

**LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGOTA DAN KELOMPOK KERJA BP3OKP
PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN MARET
NOMOR: LAP-03/BPP/PPS/IV/2025**



KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dana Otonomi Khusus (Otsus) disalurkan sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Setelah 20 tahun berjalan, Pemerintah Pusat melanjutkan penyaluran Dana Otsus dengan memperkuat payung hukumnya melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu perubahan penting yang diusung adalah penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Otsus, melalui pembentukan badan khusus, yaitu Badan Pengarah Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pembentukan BPP bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh Dana Otsus Papua. Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dengan fokus pada penggunaan Dana Otsus secara efektif dan efisien, guna mewujudkan visi pembangunan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat yaitu kompleksitas koordinasi antara lembaga dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPP, dengan fokus pada memperkuat koordinasi, memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua, serta menjembatani pemahaman dan komunikasi yang

efektif antara semua pihak terkait.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Otsus. Dalam arahan presiden pada 11 Maret 2020 dikatakan bahwa “Perlunya semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, dan desain baru agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Selanjutnya dalam 5 kebijakan percepatan pembangunan Papua yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yaitu penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan tata Kelola, penguatan partisipasi & sinergi pelaku dan FOKUS pada kemanfaatan bagi OAP.

Berdasarkan misi RIPP 2022-2024 yaitu Memberikan pelayanan Pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju “Papua Cerdas”, dengan sasaran Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk Meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dimensi pembangunan yang terdiri atas Fasilitas pendidikan yang berkualitas, Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif, Distribusi tenaga pendidik yang merata, dan Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Maksud kunjungan kerja, rapat, dan audiensi dari Anggota BPP, kelompok kerja (Pokja) Papua Cerdas, Papua Sehat BPP PPS, bersama Pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan sekolah-sekolah pusat pendidikan peserta didik Orang Asli Papua pada Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, adalah untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. SHEK, Evaluasi pelaksanaan penggunaan dan penyerapan dana Otonomi Khusus Tahun 2024
- b. SHEK, Sosialisasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)
- c. Koordinasi dan sinkronisasi rencana program kerja Daerah Tahun 2025 agar selaras dengan RIPPP
- d. SHEK, Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta percepatan pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang Pendidikan dari PAUD – SD melalui Pendidikan guru
- e. SHEK, Peninjauan tempat pelayanan Kesehatan dan sekolah di wilayah Kabupaten Asmat.

2.2 Tujuan

Tujuan dari kunjungan kerja, rapat, dan audiensi antara Anggota BPP, kelompok kerja (Pokja) Papua Cerdas, Papua Sehat BPP PPS pada Pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan sekolah-sekolah pusat pendidikan peserta didik Orang Asli Papua pada Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan adalah untuk Memperoleh data dan informasi tentang proses pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun yang telah dilalui yaitu tahun 2024 dan rencana kerja yang telah disusun untuk pelaksanaan proses pembangunan tahun berjalan yaitu tahun 2025.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan,

- Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
 - e. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
 - f. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
 - g. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan audiensi dalam rangka implementasi pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan sinergi dalam rangka SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) Pelaksanaan Tugas Badan Pengarah Papua dan Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas dan Papua Sehat telah dilaksanakan pada Hari Senin, 16 Maret s/d 21 Maret 2025 yang berlokasi pada Kabupaten Asmat. Secara rinci pelaksanaan kegiatan terurai di bawah.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

1. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan yang terlibat dalam penugasan kunjungan kerja, rapat, dan audiensi pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura, adalah:

1. Anggota BPP-PPS : Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.,M.Si,MRSC;
2. Anggota POKJA Papua Sehat : dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay;
3. Anggota POKJA Papua Cerdas : Ir. Frederik Haryanto Sumbung, ST.,M.Eng;
4. Pemerintah Kab. Asmat :
 1. Asisten 3 Kabupaten Asmat
 2. Kepala Bapeda beserta Jajarannya
 3. Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya
 4. Kepala Dinas Kesehatan beserta Jajarannya

2. Dasar dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja

Dasar pelaksanaan kunjungan kerja dan koordinasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Kunjungan Kerja :

- Surat Permohonan : 20/BPP/PPS/III/2025
- Tanggal Permohonan : 07 Maret 2025
- Surat Tugas : ST-28/SETBPP/JYP/2025
- Tanggal Surat Tugas : 13 Maret 2025

2. Jadwal Pelaksanaan : 16 – 21 Maret 2025

3. Transportasi perjalanan

- a. Pesawat Udara : Meruake – Ewer (PP)
- b. Transportas Sungai/Laut : Pelabuhan Distrik Ewer – Pelabuhan Kab. Asmat | Asmat
- c. Transportasi Darat : Rumah – Bandara | Merauke (PP)
: Bandara – Pelabuhan | Distrik Ewer (PP)
: Pelabuhan – Hotel | Kab. Asmat (PP)

4. Akomodasi Asmat : Hotel Asmat Permai, 16-21 Maret 2025

Tabel 1 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan

Hari/Tgl/Jam	Uraian Kegiatan	Keterangan
16/03/2025	Perjalanan Anggota BPP dan Pokja	Tranportasi Udara, Darat dan

12.30-15.30	BPP-PPS Ke Kabupaten Asmat	Sungai
17/03/2025 09.00 – 14.00	Pertemuan Rapat Koordinasi Bersama Asisten 3, Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Bapeda Beserta Jajaran, Kepala Dinas Pendidikan beserta Jajaran, Kepala Dinas Kesehatan beserta Jajaran, serta Pimpinan Instansi terkait Se-Kabupaten Asmat	Koordinasi dan Soaialisasi tentang implementasi UU No. 2 tahun 2021, PP No. 106 Tahun 2021, PP No.107 Tahun 2021, Perpres No.24 Tahun 2023, Permendikbud ristek dikti No.44 Tahun 2023 dan Permenkeu RI No.33 Tahun 2024 oleh Anggota BPP (Yosep Y.Yolmen,S.Pd.,M.Si, MRSC).
18/03/2025 09.00 – 13.00	Koordinasi bersama Kepala Dinas beserta Jajaran Pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat	Koordinasi dan konsolidasi tentang Otonomi khusus pada bidang pendidikan, yang sudah berjalan dan yang direncanakan pada Kabupaten Asmat.
14.00-17.00	Koordinasi bersama Kepala Dinas beserta Jajaran Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat	Koordinasi dan konsolidasi tentang Otonomi khusus pada bidang Kesehatan, yang sudah berjalan dan yang direncanakan pada Kabupaten Asmat.
19/03/2025 09.00 – 16.00	Kunjungan dan koordinasi pada Sekolah-sekolah yang mayoritas peserta didik OAP, diantaranya : PAUD Cahaya Kasih , SD Negeri Mbait, SMP Negeri Mbait, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Asmat	1. Peninjauan Kondisi lingkungan sekolah 2. Koordinasi dan konsolidasi secara interaktif bersama kepala sekolah, guru dan tendik terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada setiap sekolah yang dikunjungi, dan 3. Memberikan motivasi bagi peserta didik
20/03/2025	Rapat Koordinasi Evaluasi dan	1. Prensentasi Ringkasan Materi

rencana program bersama jajaran
pimpinan dan penanggung jawab
program Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat

Bidang Pendidikan sesuai PP
No.106 Tahun 2021, Perpres
RI No. 24 Tahun 2023,
Permendikbud Ristek Dikti
No. 44 Tahun 2023 dan PMK
No.33 Tahun 2024, oleh
Anggota POKJA Papua
Cerdas BPP-PPS

2. Presentasi

pertanggungjawaban
Program Bidang Pembinaan
Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Kab. Asmat
tentang Realisasi Pemberian
Makanan Anak Sekolah
(PMAS) Tahun 2024

3. Presentasi Laporan
Pelaksanaan Program oleh
Bidang pembinaan
Pendidikan anak usia dini &
Pendidikan non formal
tentang Pelaksanaan Dana
Otsus 2024 Bidang PAUD &
PNF.

○ Hasil Kegiatan Kunjungan Kerja

**1) Kunjungan Kerja dan Rapat Kordinasi Bersama Pemerintah Daerah
Kabupaten Asmat.**

Hari/Tgl : Senin, 17 Maret 2025;
Jam : 09.00 – 14.00
Tempat : Aula Kantor Bapeda Asmat

Berdasarkan surat permohonan kunjungan koordinasi 20/BPP/PPS/III/2025 tanggal 07
Maret 2025, yang dikirim oleh Anggota BPP-PPS yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten,

dengan agenda yang tertuang pada surat tersebut, telah direspon positif oleh Bupati Kabupaten Asmat untuk menerima kunjungan koordinasi Anggota BPP dan Anggota POKJA BPP-PPS. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan dilaksanakan pada Aula Kantor Bapeda Kabupten Asmat. Sesuai dengan uraian kegiatan pada Tabel 1 di atas, diperoleh hasil dari pertemuan tersebut, secara berurutan, sebagai berikut.

a. Susunan Acara Pertemuan Rapat Koordinasi Pada Aula Kantor Bapeda Asmat

- 1) Pembukaan
- 2) Sambutan oleh Asisten 3 Kabupaten Asmat
- 3) Pemaparan Kepala Bapeda/BPKAD
- 4) Sambutan dan Arahan Pimpinan MRP
- 5) Sambutan dan Arahan Anggota BPP-PPS
- 6) Sambutan Ketua DPR-K Kabupaten Asmat (Ferdinandus Akyan)
- 7) Pemaparan ringkasan Laporan Pelaksanaan Program tahun 2024 oleh Kabid Sosbud Bapeda Kab. Asmat (Bpk Marthinus)
- 8) Diskusi dan tanya Jawab tentang implementasi program pelaksanaan otsus Papua

b. Sambutan-Sambutan dan Pemaparan Laporan dan Program

(1) Asisten 3 Kabupaten Asmat

- Perhatian OPD untuk melaporkan hasil pelaksanaan program tahun 2024, harapan dana otsus dirasakan oleh masyarakat.
- Pada bidang kesehatan perlu peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat karena dukungan pemerintah yang maksimal dengan adanya pembangunan rumah sakit baru yang sudah beroperasi, distrik-distrik sudah ada puskesmas yang permanen dan sudah ada yang diakreditasi yang berdampak membantu pelayanan masyarakat.
- Gerak cepat pada pelayanan kesehatan, terutama dari distrik (Puskesmas – Rumah Sakit), jangan sampai ada masyarakat yang meninggal akibat lambannya pelayanan kesehatan.
- HB masyarakat rendah dan khususnya pada ibu hamil yang rendah dari 12, fisik OAP Asmat cukup kuat yang rata-rata di bawah 8 dan kadang 5, tetapi masih kuat, namun ini menjadi perhatian serius dinas kesehatan.
- Hasil presentasi UNICEF, Cakupan imunisasi yang sangat rendah tahun

2024, ada yang sampai 16%, yang artinya sekita 84% imunisasi tidak terlaksana, dan ini berdampak pada anggaran yang tidak dipakai. Kalau cakupan rendah, Perhatian penyerapan anggaran untuk tindaklanjut permasalahan.

- Kasus Campak rendah 3 tahun akan berdampak KLB. Contoh kasus Suator
- Hindari dan tinggalkan penyampaian kertas kerja yang tidak benar/bohong, sebaiknya sampaikan sesuai kondisi riil, agar adanya penanganan. Jangan membuat masyarakat susah.
- Banyak kegiatan khusus untuk masyarakat, seperti pelatihan masak-memasak, dilaksanakan namun tidak ada pemantauan /pengawasan keberlanjutannya. (Perlu untuk di tindaklanjuti dalam program pemerintah daerah)
- IPM Asmat masih rendah
- Untuk pendidikan jangan ada putus sekolah akibat mengikuti orang tua. (Perlu adanya sosialisasi dan pembelajaran kepada orang tua murid)
- Pengawasan pada ibu hamil mellaui pemerintahan distrik, untuk keberlanjutan kesehatan ibu dan anak (Hamil – Melahirkan) dan masa pertumbuhan balita.
- Kerja keras pemerintahan dari tingkat kampung dan distrik perlu dipertegas.
- Tidak adanya inovasi yang dibuat akibat dampak dari kegagalan, untuk pelayanan program bisa mengena dan berkelanjutan, khusus kesehatan dan pendidikan. [Perlu adanya Evaluasi ada tidaknya Inovasi terkait dampak dan kegagalan program secara berkesinambungan dan berkelanjutan pada bidang Pendidikan]
- Karena imunisasi kurang lengkap maka berdampak pada kesehatan/imun tubuh anak-anak.
- Kegiatan program dilaksanakan terus setiap tahun, namun tidak ada perubahan dan peningkatan, Dana besar tetepi tidak serius pengelolaannya.
- Harapannya dana otsus dapat membantu masyarakat yang masih hidup dalam kekurangan secara menyeluruh. Dalam pengelolaan keuangan sudah bagus, namun pencapaian hasil masih kurang.
- Hasil Unicef menjadi tolak ukur ke depan dengan harapan adanya inovasi

baru.

- Harapannya OAP Asmat dapat hidup sejahtera, senang dan bahagia melalui dana OTSUS

(2) Pemaparan Kepala Bapeda/ BPKAD

- Adanya perhatian khusus Provinsi Papua Selatan, dari MRP (dengar pendapat/audensi tentang rencana kerja pembangunan daerah)
- Pelaksanaan dana otsus di Kab Asmat sudah 4 tahun.
- Perhatian dari BP3OKP
- Diharapkan arah pembangunan Kab. Asmat dapat disinergikan dari tugas dan fungsi bersama MRP dan BP3OKP
- Penjelasan singkat, sesuai UU OTSUS dan turunan regulasi, terkait RIPPP dan PMK No. 33
- Adanya pengurangan dana APBN, otomatis berimbas pada dana OTSUS.
- Sesuai Amanat UU OTSUS, PP 106 dan 107 dana OTSUS Mengacu pada dana APBN yang tertuang didalamnya 2,5% dari dana APBN
- Dengan adanya pengurangan dana APBN yang tahun 2025 yang awalnya Rp. 260 Milyar lebih dan adanya pengurangan Kab Asmat (KA) berkurang sek Rp. 8 Milyar lebih, penyesuaian dengan DPA yang sudah dibagi melalui Bupati
- Gambaran singkat Kab Asmat setelah DOB Baru Dana Otsus (DO) 2022 – 2025 sebelum pengurangan baik *block grand* maupun *spesifik grand* dan BT yang berproses 2025 Rp. 901.089.256.000,- milyar – 8 M total diteri Rp. 893.599.000.364,- dengan pemandu dana otsus berdasarkan arah kebijakan UU Otsus dan turunannya.
- UU, PP Otsus sesuai visi dan misi percepatan pembangunan papua (P3) yaitu misinya terwujudnya Papua Mandiri Adil dn Sejahtera yaitu:
 - a) memberikan pelayanan kesejahteraan yang berkualitas, serta membudayakan hidup sehat di masyarakat menuju papua sehat.
 - b) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif berkarakter dan mampu bekerjasama menuju Papua Cerdas,
 - c) Meningkatkan kompetensi, kreatifitas dan inovasi dalam perkembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing menuju

Papua Produktif.

- Untuk Papua Sehat (PS), sasarannya adalah tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk
- Papua Cerdas (PC) sasarannya tercapainya kehidupan yang cerdas dan berwawasan
- Papua Produktif (PP) sasarannya tercapainya kemampuan bekerja berusaha, berinovasi serta mampu mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan. (Amanat RIPPP)
- Bagaimana dengan Kabupaten Asmat , untuk gambaran Dana Otsus yang masuk Th 2024, utk Dana Otsus Block Grand dan Spesifik Grand, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) totanya ± Rp.272 M utk Dana Otsus setelah Efisiensi tahun 2025 tadinya ± Rp.260 M berkurang menjadi ± Rp. 252 M.
- Apa saja keg 2025 dari Dana Otsus yang akan dilaksanakan th 2025 yi : Ada 19 OPD pemangku Dana Otsus di Kab. Asmat
- Untuk Bidang Pendidikan ada 3 OPD yaitu dinas pendidikan, bagian kesra, Sek Daerah
- Untuk kesehatan melalui Dinas Kesehatan
- Ekonomi Kerakyatan ada dinas tanaman pangan, dinas perindustrian, dinas kelautan dan perikanan
- Utk bidang fisik dan prasarana PUPR Perhubungan Perumahan dan Lingk hidup
- Afrimasi Dinsos, pemberdayaan perempuan, dinas pariwisata dan kebudayaan dinas Kepndudukan dan Capil, dinas ESDM dan bidang perencanaan pengewasan dan pengangan ada BP4D.
- Sesuai amanat PP 106 utk anggaran tahun berikut mengacu pada tahun sebelumnya, sesuai PP 106 ditindaklanjuti PMK 33 tdk bisa keluar dari Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, sehingga ada kebijakan yang disampaikan oleh Bupati melalui Musrembang dan Musrembang Otsus tahun 2026, tidak keluar dari 3 Misi RIPPP.
- Gambaran bahwa terkait dengan Dana Otsus sdh diatur di PMK 33 bahwa laporan tahunan wajib disampaikan sebelum 31 Maret, dan sementara lagi berproses, kemungkinan hari ini Laporan Tahunan (LPT) akan diupload

di SIKD

- Selama pelaksanaan RPJMD 2021-2025, sementara menyusun Bupati terpilih 2025-2029 sementara berproses. (Cek prosedurnya sesuai regulasi Otsus – Minta Jadwal Penyusunan Regulasi Pemerintah daerah secara rutin setiap tahun, agar menjadi perhatian).
- Proyeksi indikator capaian kinerja kuci Kabupaten Asmat dan juga masuk dalam indikator Makro, untuk IPM Kabupaten Asmat target utk RPJMD 2021-2025 dgn target 2025 adalah 54.08, utk capaian 2024-2025 masih berproses sehingga data yang kami dapat melalui Asmat dalam Angka yang dirilis oleh BPS capaian 2024 IPM 57,63 sehingga target 2024-2025 melewati 3 point.
- Presentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat target penurunan 21,84% utk thn 2025, dan sdh dapat diturunkan 24,54% .
- Untuk laju pertumbuhan ekonomi agak melambat, akibat kekurangan anggaran DAK DAU seharusnya tahun 2025 : 6% sedangkan tahun 2024 : 3,47%. Semoga bisa naik sedikit namun dengan efisiensi ?
- Untuk Anggaran Tahun 2025 untuk DAK Hilang sekitar 30 M, Utk dana DPUPR DAU Hilang 26 M artinya sudah beberapa pembangunan yang tertunda atau tidak terealisasi di Kabupaten Asmat, yang SDM mayoritas OAP.
- Utk tingkat Pengangguran terbuka targetnya 0.84% sdh di capai 2.05%.
- Untuk laju pertumbuhan penduduk, target di 2025 1,70%, THn 2024 5,25%.
- Perbandingan IPM Thn 2024 Kabupataen Asmat secara nasional Papsel rendah KA : 57.63, Papsel : 68,86, Nasional : 75.02, target Kabupataen Asmat 2024 : 57.63 pencapaian luar biasa naik 3% di target 2025. Dengan komponen indikatornya diantaranya Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupataen Asmat tahun 2024 : 68,05 tahun, untuk Papsel AHH 2024 L 68,46 tahun Nasional 74.15, Untuk HLS 2024 Kabupataen Asmat. 9,71 thn , Papsel : 12,67 thn Nasional 13,21 thn, untuk RLS 2024 Kabupataen Asmat :5.82 th, Papsel : 8,38 th, nasional : 8,85 th.
- Untuk pengeluaran perkapita penduduk Kabupataen Asmat tahun 2024 : Rp. 6.262.000, PPS : 9.759.000,- Nasional : 12.341.000, sebagai indikator pendukung dari IPM.

- Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar masih di th 2022, untuk SD :98.10, SMP :62.33, SMA 66.18
- Untuk sarpras termasuk dengan Murid untuk TK, SD, SMP dan SMA sesuai asmat dalam angka tahun 2025 untuk TK : gedung 62 , muridnya : 2.685, guru : 353, SD sederajat Gedung 140, Murid :23230 guru:839 data sektoral yang dirilis oleh BPS untuk proyeksi 2024. Untuk SMP Gedung : 24, Murid :4269 Guru :352 Untuk SMP Gedung : 6, Murid :1934 Guru :142
- Faskes RSUD : 1, Puskesmas :26, pustu :58 Apotik Kabupataen Asmat:3
- Untuk Tenaga kesehatan/medis : 23 Dokter umum dan spesialis, untuk perawat, bidan dll : 367 tenaga kefarmasian : 20, untuk puskesmas dan pustu tenaga medis $\pm$ 43 org, perawat, bidan dll : 649 tenaga kefarmasian : 44, BPS Asmat dalam angka (ADA) th.2025.
- Penduduk miskin (PMN) KA, 2021 ADA : 111.632 dgn Jumlah PMN : 25.000, presentasi PMN 24.83% Indeks kedalaman kemiskinan (IKK) : 4.08%, Indeks keparaan Kemiskinan (IKNK) : 0.91%, utk 2023 jika disandingkan Jumlah Penduduk (JP) : 116.200 Jum PMN: 25.580, PPMN :24.36 artinya ada penurunan 0.5% 2021-2023, 2024 dengan JP sekarang : 120.902, JPMN : 26.000, naik krn JP Naik. PPMN : 24.50% meningkat $\pm$ 0.2%
- Terkait konstruksi bangunan, konsumsi pengeluaran masyarakat terkait dengan komoditi yang ada di Kabupataen Asmat untuk kebutuhan hari-hari
- Luas kawasan hutan di Kabupataen Asmat berdampak pada krisis dalam pembangunan fisik, karena luas areal hutan lindung di Kabupataen Asmat sudah dipinggiran kota Kabupaten, sehingga dengan adanya Inpres No.5 tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan, pemerintah Kabupataen Asmat agak berhati-hati utk membangun bangunan fisik di kawasan Hutan lindung (KHL), utk diketahui kantor bupati Asmat masih di atas kawasan Hutan lindung, jalanan yang akan dibangun dipinggiran kota semua masuk KHL, dengan adanya Inpres No. 5 berdampak pada pemda, karena dikuatirkan terindikasi pejabat pemerintah akan membangun di KHL, selanjutnya terus akan dipanggil terkit ijin kawasan hutannya, dan

bagaimana mempertanggungjawabkannya. Sedangkan pemda harus membangun dari dana yang ada, untuk perkembangan kota. Di satu sisi membangun di atas KHL yang akan melakukan pelanggaran terhadap Inpres No. 5, dan dengan ketua Pokjanya adalah Jaksa Agung. Contohnya akan adanya pembangunan 2 gedung baru, mengingat Inpres No. 5 tersebut akhirnya dipending dengan anggaran 18 M. Sampai Perttek RW Provinsi, ada titik harapan melalui Kadin Lingkungan Hidup (LH), bersama Tim, melalui KLHS, RT, RW Kabupaten utk meminta perluasan areal utk dipergunakan pemabangunan fisik, melalui RT RW Provinsi. Sampai hari ini belum ada kejelasan, berdampak terkatun-katunnya dengan persoalan ini. Karena Kabupataen Asmat sudah ada RT RW yang akan dilanjutkan sampai ke tahap Perda pembaharuan RT RW No. 5 thn 2012, yang lama, sehingga akan diperbaharui terkait dgn luasannya namun harus menunggu RT RW Provinsi terlebih dahulu baru dilanjutkan, dan hal ini menjadi persoalan.

- Selanjutnya untuk diketahui bahwa HL di Kabupataen Asmat 1.109.984,52 Ha di dalamnya ada areal penggunaan lain 7.251 Ha, Hutan produksi terbatas 962 Ha, hutan produksi tetap 84.000 Ha, hutan produksi yang dapat dikonversi 38 Ha, taman nasional lorents 287.000 Ha, Taman Nasional perairan 27.06 Ha, ..Jumlah keseluruhan 2.501.497,81 Ha, utk dipinggiran kota lihat peta hijau sekali hutan lindung.

(3) Arahan dan Sambutan dari Ketua MRP

- Ibu Paskalina H (Pokja Perempuan), Ibu Mutia, Bpk Olif (Pokja Adat), POKJA Agama, Ketua Dewan Kehormatan dan Anggota Pokja Agama.
- Tujuan ikut hadir Musrembang dari distrik smp Kabupaten.
- Melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan MRP, yaitu mendeteksi Awal perjuangan hak2 OAP PS, PC dan ekonomi, hasil2 Musrenbang mmuat semua hak2 dasar OAP.
- Jika ada yang penting dikonfirmasi
- Ada 19 OPD, harapannya bahu2 kerjasama saling terbuka utk meningkatkan apa yang diharapkan dan diinginkan OAP
- Anggaran cukup tetapi masih ada kesenjangan dan tdk bisa dipungkiri, seluruh OPD mempunyai kemampuan

- Setelah kegiatan, berharap dapat memperoleh data terkait Musrembang.
- Adanya lulusan SMA dan PT , khususnya OAP Asmat yang telah lulus namun belum memperoleh ijazah dikarenakan belum menyelesaikan administrasi baik pada sekolah menengah maupun PT. [Konsultasikan untuk adanya Penegasn kepada dinas pendidikan untuk menyelesaikannya]
- Info demo terkait dengan penerimaan pegawai, OAP yang mengalami kesulitan, Solusinya dipikirkan bersama.
- Akan ada kunjungan ke setiap instansi, terkait dengan penyelesaian masalah bersama.
- Koordinasi bersama terkait dengan pelaksanaan Otsus

(4) Anggota BPP-PPS

- Tujuan utama kunjungan kerja BPP-PPS pada Kabupaten Asmat adalah untuk mendapatkan laporan percepatan pembangunan dalam rangka Otsus Papua, termasuk dengan penggunaan Dana Otsus sesuai UU No. 2 Tahun 2021 dan turunannya seperti PMK 33, dan mempertegas terkait tugas dan fungsi BP3OKP sebagai organisasi non kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan sinergi.
- Sesuai PMK 33 terkait pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus, pemerintah daerah wajib berkoordinasi dan diarahkan oleh BP3OKP
- Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Th 2024, terkait penyerapan anggaran, dan selanjutnya akan dilakukan observasi sesuai penggunaan anggaran sudah tepat sasaran atau belum sesuai.
- Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi dalam jabatan BPP, meminta laporan Pertanggung Jawaban Keuangan sesuai perintah UU, Perpres dan ditegaskan PMK, Mohon kerjasamanya.
- Hasil diskusi Ketua DPR Kabupaten Asamat, masih banyak sekolah2 yang siswanya belum mampu Baca tulis.
- Pembenahan database, agama, adat melalui sistem yang interaktif agar dapat di akses oleh lapisan masyarakat. Dan diharapkan database tersebut untuk memudahkan dalam proses pembangunan dan tepat sasaran.
- Visibity study, mapping wilayah harus dibuat, Kekhususan harus

diperlihatkan secara detail, dan diharapkan mulai tahun 2025 dan seterusnya harus berbenah perbaikan sistem data-data OAP.

- Keterbatasan anggaran dapat di tindaklanjuti dengan ketersediaan data yang selanjutnya akan dikomunikasikan dengan K/L di Jakarta.
- Target angka stunting 2041 harus “0”
- Kebutuhan data di pusat, terkait permasalahan di daerah disampaikan ke pusat.
- Tindak lanjut koordinasi efisiensi anggaran bersama kementerian dalam negeri.
- Jangan terjadi SILPA yang berlebihan, diharapkan adanya tertib manajemen pada OPD.
- Harapan penyerapan anggaran 95%, hasil Musrembang sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyerapan anggaran.
- Evaluasi kinerja masing-masing OPD dilakukan oleh Pimpinan Daerah.
- TW.1 sudah selesai, apakah sudah dilakukan evaluasi, utk itu apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui Pemerintah Daerah, diharapkan dapat melibatkan BPP-PPS untuk didiskusikan dengan tujuan mencari bersama.
- Evaluasi dilihat dari perencanaan harusnya TW 1 penyerapan anggaran seharusnya sudah 25%, TW selanjutnya disesuaikan.
- Filosofi, berharap pimpinan OPD yang berkompeten sesuai bidangnya, integritas dan kapabilitas.
- Harapannya kepada Asisten 3 dan Kepala Bappeda, dapat menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan program, sesuai berakhirnya periode waktu setiap triwulan.
- Buatlah perencanaan yang bijak dan matang.
- Diharapkan semua kepala OPD dapat menyusun perencanaan pembangunan yang bijak dan matang, dan wajib memahami tujuan dan arah pembangunan, dan wajib turun ke lapangan.
- Adanya bantuan perumahan dan kementerian perumahan dan transmigrasi.
- Untuk pendidikan anak-anak OAP pentingnya database, agar pembagian Dana Otsus tepat sasaran, demikian juga untuk kesehatan.
- Buatlah Pakta Integritas untuk anak-anak yang memperoleh beasiswa khususnya untuk Jurusan Kedokteran, dan juga penggunaan anggaran

yang tepat sasaran.

- Pendidikan Pola Asrama sesuai permendikbudristek no. 44 tahun 2023
- Pembangunan Meseum Papua Selatan, agar menjadi tempat untuk melestarikan cagar budaya Papua Selatan.
- Mohon bantuan MRP untuk melestarikan identitas dan entitas suku-suku di Papua Selatan.

(5) Sambutan Ketua DPR K Kabupaten Asmat

- Harusnya DPR K harus dilibatkan dalam setiap kegiatan Pembahasan terkait dengan Pembangunan
- Pendidikan, banyak anak2 yg tidak sekolah karena tidak ada akta, akibat dari tidak ada surat keterangan lahir dari puskesmas/rumah sakit.
- Perlunya keterlibatan berbagai pihak, banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah disebabkan tidak memiliki akte kelahiran.

(6) Pemaparan dan Penjelasan Penggunaan Anggaran Otonomi Khusus di Kabupaten Asmat oleh Kabid Sosbud Bapeda Kab. Asmat (Bpk Marthinus)

- Sesuai nomenklatur baru Mekanisme musrembang tingkat kampung dilakukan oleh Distrik yang sebelumnya difasilitasi oleh Bapeda
- Musrembang Distrik dilakukan di distrik
- Musrembang RKPD tingkat Kabupaten sdh dilaksanakan pada Maret ini
- Musrembang Otsus, adanya konsultasi dengan pihak provinsi dan dukungan Bupati Asmat dengan program prioritasnya.
- Untuk khusus otsus akan ada desk utk pembahasan masing2 RKA dari masing2 OPD Oengguna Dana Otsus.
- Sampai saat ini semua propinsi di Papua belum mperoleh penyaluran Dana Otsus, untuk Dana Otsus sampai pada tingkat Kabupaten, tergantung pemenuhan syarat salur dari masing-masing daerah. Adapun laporan syarat salur yang wajib disiapkan terdiri dari :
 - Rencana Anggaran Program (RAP),
 - Validasi RAP dan APBD,
 - Laporan tahunan dan APBD.
- Untuk thn 2025 belum ada, karena baru selesai menyusun perubahan RAP karena ada penyesuaian Dana Otsus, dan sudah diinput, tinggal dokumen syarat salur dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi Ulang, dilampiran

Validasi

- Validasi RAP dan APBD harus merge.
- Laporan Tahunan 2023 yang dilaporkan 2024, Tahun 2024 yang dilaporkan Tahun 2025 dibuat oleh Bappeda dan BPKAD. Dan data realisasi OTSUS OPD, Lapornya dari Bappeda.
- Laporan harus disampaikan ke BP3OKP, batas 31 Maret 2025
- Dana Otsus Tahap 2 tahun 2022 dengan besaran sesuai OPD yang mengampu 16 OPD sub keg 26, yang 1%/ BG, 43 di SG, *Mandatory spending* (MS) Pendidikan Minimal 30%, Kesehatan minimal 20%, lainnya adalah ekonomi, artinya pendidikan boleh lebih dari 30% dan kesehatan boleh lebih dari 20%, konsekuensinya ekonomi kerakyatan akan turun.
- Presentasi *mandatory spending* pada Kab Asmat, mengalami peningkatan sejak tahun 2022. Daerah diberi wewenang untuk menentukan prioritas.
- Tahun 2022 sesuai *mandatory spending* di Kabupaten Asmat, Pendidikan mencapai 31%, kesehatan secara keseluruhan 16%, ekonomi 33%
- Tahun 2023 *mandatory spending*, untuk pendidikan 39%, Kesehatan 21%, Ekonomi turun 40%.
- Tahun 2024 *mandatory spending*, untuk Pendidikan 46% Kesehatan 29%, dilihat dari pencapaian MS menunjukkan bahwa KA sdh memprioritas anggaran ke *mandatory spending*.
- Tahun 2025 MS, Pendidikan 46% Kesehatan 29%, serta Ekonomi kerakyatan yang proporsional.
- Proporsi otsus thd APBD, th 2022 KA 9% APBD adalah Dana Otsus, 2023 12% APBD Dana Otsus selain DAU, DAK dan Dana Desa, th 2024 16%, 2025 14% proporsi Dana Otsus di APBD KA.
- Tahun 2025 BG 37 Sub kegiatan yang dibiayai 19 OPD diluar belanja kesehatan, SG 73 sub kegiatan, DTI untuk pembangunan jalan konstruksi beton dan rekonstruksi jalan. Diasmat jika ada jalan di atasnya ada atap seng, itu sumber dananya Dana Otsus dan sampai ke kampung-kampung. Contoh 2025, ttg pasien rujukan. Sdh disiapkan 2,5 M. Adanya rumah singgah di kompleks RS, dan makan pasien bersert keluarga minimal 1 orang di tanggung pembiayaannya. Dikarenakan Dana Otsus belum jalan /ada sehingga belum terealisasi

- Ibu bersalin, sudah disosialisasikan ke seluruh pelosok Kab Asmat, untuk ibu-ibu hamil yang mau bersalin Wajib di Puskemas, karena sudah di sediakan Makan Pasien, Pakaian Bayi, Pakaian ibu melahirkan semua tersedia di Puskemas.
- Dipuskemas telah disediakan pembiayaan Kesehatan ibu bersalin, balita, gizi masyarakat kemudian ada juga
- Sekolah berpola asrama yang berada di distrik Sawah Erma dan Distrik Agats
- Masalah pada sekolah berpola Asrama adalah PENGELOLA Asrama Agak Sulit. Yang bisa melakukan dan menjalankan pendidikan berpola Asrama adalah pihak2 dari Gereja, perlu didorong oleh pemerintah untuk berkolaborasi.
- Untuk belanja pertanian/ekonomi sudah fokus melayani lokus stunting sudah ada, contoh 2024 ada 29 lokus stunting dan semua OPD sudah fokus ke sana. Bagaimana pertanian membangun lokus2 dan dikawal di Bapeda. (Pertanian, kesehatan dan perikanan dll) sudah sampai kesana.
- Kab. Asmat mempunyai modal usaha untuk mama-mama Papua. Salah satu keunggulan yang tidak dimiliki di daerah lain adalah yang bisa menjaring, yang bisa menjual di Pasar adalah orang asli asmat. Positif pembagian cluster ekonomi.
- Program-program spektakuler/hebat oleh Pemerintah Kab. Asmat (PKA), setiap tahun Rp. 6 M bantuan studi/beasiswa untuk anak-anak melalui kesra, untuk kedokteran, kesehatan, ada MoU dengan Universitas Pertamina (PS Teknik Perminyakan, PS T.Geologi, PS T. Geofisika). Pertanyaaanya Apakah anak Asmat bisa? Kemarin 3 Anak, begitu lulus mereka minder dan mundur dan pindah ke pendidikan! (Perlu dikaji lebih dalam dan tentukan langkah-langkah strategis utk aktivitas/program yang sama di tahun yang akan datang)
- Th 2025 2 anak dikirim lagi ke Univ Permina (UP). Sumber DO beasiswa Murni dengan sistem Kontrak jadi dbayar 1 M 1 th 2024 selama 4 tahun tdk perlu membayar. Dan selanjutnya akan mengikuti model ini.

c. Tanggapan, Saran dan Arahkan

(1) Anggota BPP-PPS

- Tanggapan terkait Pendidikan Pola Asrama : Ada 2 hal yang perlu diperhatikan ke depan jadi masalah Dana Otsus dan Regulasi daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), karena dengan perda itu akan mengikat utk bisa distribusi anggaran setiap tahun anggaran akan lebih mudah, sehingga asrama-asrama yang diselenggarakan melalui Gereja Katolik, protestan, Muslim (pesantren) benar2 terakomodir dgn baik. Dan sudah dibicarakan di pusat dengan kementerian terkait melalui setwapres.
- Tanggapan terkait kesenjangan sosial antara OAP dan Non OAP : Diharapkan Dukcapil dapat meredam, meminimalisir arus masuk penduduk dari luar, caranya dukcapil tidak langsung memberikan KTP bagi pendatang yang baru datang, MRP lebih tegas untuk mengantisipasi hal ini. Dapat diberikan KTP apabila yang bersangkutan sudah menetap minimal 6 bulan atau 1 tahun, tergantung regulasi daerah. Karena akan berdampak bagi OAP terutama dalam mencari pekerjaan dan diharapkan OAP juga mempunyai KTP agar dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih dipermudah.
- Perlu signifikasikan lebih spesifik agar perlakuan terhadap OAP diperjelas, karena keterbatasannya. Seperti tidak punya akta kelahiran sehingga berdampak pada saat bersekolah tanpa identitas diri yang jelas.
- Perhatian pemerintah terkait pembuatan Peta database siswa-siswi baik OAP Asmat, dan yang lahir di Asmat untuk mendapatkan pelayanan beasiswa pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan.
- Siapkan administrasi untuk mengikat terkait pemberian bantuan studi/beasiswa Pemda atau Dana Otsus, melalui Pakta Integritas atau dokumen lainnya untuk mengikat agar saat mereka selesai wajib kembali untuk melayani masyarakat sesuai perjanjian yang dibuat, min 10 dan max 15 tahun (Ikatan Dinas).
- **Tanggapan terhadap pertanyaan ketua TIM MRP terkait DO dapat digunakan untuk Pembangunan Fisik** : Sesuai PP 106, 107 PMK 33, itu dapat digunakan melalui DTI sebesar $\pm 5\%$, prentase terbesar adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk Pengusaha OAP harus ada data, spy saat

pembagian lebih mudah. Dan ada ketentuan DO tidak dapat digunakan dapat dilihat pada PMK 33 Tahun 2024.

- **Tambahan lanjutan Arahan Asisten 3 :** terkait ilmu-ilmu pasti, Asmat mempunyai hal yang mendasar sebagai SDA, yaitu Batu Bara dan Minyak dan Gas. Pertanyaannya : Berapa anak asmat yang kuliah dipertambangan dan perminyakan. SDA tersebut akan dieksplorasi, dan perlunya pemetaan baik dari SDM maupun peta wilayah pemilik ulayat potensi mineral tersebut. Selanjutnya jika dieksplorasi apakah Enginer Asmat sudah siap.
- Selain mineral, ada juga kura-kura moncong babi, pemda wajib untuk membuat regulasi untuk melindungi kura-kura moncong babi.
- Masalah OAP Asmat yang tinggal di Merauke, terkait perumahan dari Pemerintah pusat melalui Rusun. Dan selanjutnya akan ada pemulangan sesuai KTP agar distribusi Dana Otsus tepat sasaran dan merata. Dan BP3OKP akan memfasilitasi ke Gubernur dan Kemdagri.

(2) Asisten 3 Kabupaten Asmat

- Penduduk/masyarakat di pemukiman perkampungan Kab. Asmat pada umumnya sebagian besar waktunya berada di hutan, sehingga disaat akan dilakukan imunisasi terhadap balita seringkali petugas yang datang mendapatkan kampung kosong. Hal ini sudah dilakukan koordinasi untuk mengingatkan kepala kampung, agar saat kegiatan pelayanan kesehatan kampung jangan kosong.
- Hal yang sama juga terjadi di sekolah-sekolah kadang mau mengajar anak-anak tidak ada, kerja keras untuk mengajarkan orang tua agar anak-anaknya tetap mengikuti pendidikan.
- Monitoring sudah ada diinspektorat untuk melihat permasalahan di kampung-kampung, padahal OTSUS harus melihat sejauh mana kondisi masyarakat dikampung2 baik dari segi kesehatan, pendidikan dan produktifitas hidup mereka.
- Tindaklanjut untuk anak Asmat yang studi lanjut ke luar negeri, dan sebaiknya Dana Otsus tepat sasaran pada OAP Asmat.
- Pengalaman kirim 5 orang kuliah kedokteran, dan 2 orang yang berhasil melanjutkan studinya.
- Penguatan pendidikan pada jenjang SMP, SMA agar menjadi bibit unggul

untuk melanjutkan studi ke bidang-bidang Kedokteran dan bidang unggul lainnya.

- Hasil Musrembang Kabupaten telah ditegaskan oleh Bupati, dimana akan ada kerjasama dengan 3 Universitas untuk datang melihat bagaimana anak-anak SD kenapa tidak bisa baca tulis, apakah salah guru atau murid. || Periksa Alasan dan penyebabnya!!!
- Dana Otsus terus berjalan, terkesan ada pembiaran karena masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan diantaranya pada bidang pendidikan. || Perlunya perhatian lebih.
- Dana Otsus jangan sampai digunakan di luar OAP, karena akan menjadi temuan.

(3) Kepala Bapeda

- Terkait dengan Asrama Mahasiswa ditangani oleh bagian aset di BPKAD, kalau Dians Pendidikan porsinya hanya untuk SMA, SMP. Dan ada wacana, SMA akan di ambil alih oleh Provinsi.
- Semua masukan MRP, BP3OKP akan di tampung dan akan dimasukkan dalam kegiatan RPJMD dan RKPD.

2) Kunjungan kerja dan Koordinasi Bersama Pimpinan Dinas Pendidikan Asmat.

Selasa, 18 Maret 2025, Tempat :

Hari/Tgl	: Selasa, 18 Maret 2025
Jam	: 09.00 – 13.00
Tempat/Lokasi	: Ruang Kepala Dinas Pendidikan
Peserta Kegiatan	: Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Kepala Dinas Pendidikan, Seretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF), Dinas Pendidikan Asmat, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (Pak Amos Rully)
Topik Kegiatan	: Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Pelaksanaan Pendidikan

a. Susunan Acara Pertemuan

- 1) Pembukaan
- 2) Sambutan singkat dan ringkasan/ikhtisar laporan pelekseanaan Program tahun 2024, oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat

- 3) Sambutan singkat dan arahan Anggota BPP-PPS
- 4) Sosialisasi dan diskusi tentang tugas dan fungsi BP3OKP/BPP dalam pelaksanaan Otsus Papua khususnya pada bidang pendidikan.

b. Topik Perhatian Sambutan, Arahan, Saran dan Tanggapan

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asmat (Barbalina Toisuta, SE)

- SMA/SMK sampai saat ini belum ada bidang yang menangani dan melekat di umum dan menjadi tugas pembantuan, kasubag Program dan satu tusi sekretaris.
- KA banyak kendala jika dilihat dari segi geografis
- Kenapa anak2 usia sekolah OAP tidak memperoleh pendidikan? SD ada 140; SMP 24. Untuk SMP di setiap distrik hanya ada paling banyak 2 SMP, dan di Kabupaten ada 5 SMP.
- Kabupaten Asmat terdapat 224 Kampung 25 Distrik, 125 Kampung yang ada sekolah 99 kampung belum ada sekolah sama sekali. Anak usia sekolah yang ada di 99 kampung tidak bisa berpindah ke kampung yang ada sekolah, karena jaraknya cukup ekstrim karena ditempuh dengan transportasi air.
- Sudah dibuatkan program untuk program membangun sekolah kecil yang terdiri atas kelas 1-3 pada kampung yang sama sekali belum ada sekolah.
- Prioritas Bupati dan Wabup sekolah di arahkan pada sekolah berpola Asrama. Sudah ada beberapa sekolah seperti SMA, SMP, SD yang sudah diarahkan dengan pola asrama.
- Dari kelas kecil selanjutnya pada kelas 4 dst akan dipindahkan ke sekolah2 pada kampung-kampung yang terdekat dengan Pola Asrama
- Rencana akan dibuat asrama di distrik untuk menampung dan mendidik siswa yang telah selesai dari kelas kecil dari berbagai kampung.
- Tidak semua jenjang pendidikan tersedia di setiap kampung, selain SD, dan dari jumlah SD tidak sebanding dengan SMP dan SMA, namun siswa yang masuk SMP paling banyak 17 siswa setiap tahun. Karena SMP kurang berdampak pada siswa yang lulus SD dari kampung-kampung yang jauh dari lokasi SMP sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah.
- Pertimbangan siswa lulusan SD dari kampung-kampung yang tidak terdapat SMP, adalah tidak adanya tempat tinggal, makan dll. pada

daerah/lokasi SMP yang letaknya jauh dari kampung asal siswa lulusan SD.

- Pembangunan SMP pada kampung sekitar yang terdapat beberapa SD pada kampung-kampung terdekat.
- SMA ada 5 : 4 SMA dan 1 SMK, lanjutan tindak lanjut pembangunan SMA pada 2 titik, yaitu di Sawa Erma dan Pantai Kasuari.
- Sudah ada perencanaan akan dibangun SMP dan SMA di pusat-pusat distrik
- Untuk Guru kalau Rasio PNS P3K dari PAUD – SMA/K tidak cukup, dan saat ini ada guru honor sebanyak 1030 org dari jenjang PAUD – SMA/K, Di biayai Pemda melalui APBD, dengan DPA Dinas Pendidikan.
- Anggaran yang dipakai adalah DAU dan OTSUS untuk pembayaran guru honor sebanyak 1030
- Adanya penumpukan guru di Kab. Asmat : Rombel setiap tahun pelajaran akan bertambah, karena SMP dan SMA tidak banyak di distrik. Rombel bertambah otomatis akan meningkatkan kebutuhan jumlah guru.
- Masih banyak keluhan dari pihak sekolah terkait kekurangan guru mata pelajaran.
- P3K di Kab. Asmat tetap ada mengajar di Swasta, krn Intensitas YAYASAN berkoordinasi dgn Dinas, dan Yayasan di Kab. Asmat, 90% pembiayaan bersumber dari Pemda.
- Dari penumpukan guru terjadi di Mata Pelajaran di SMP waktu penetapan CPNS tahun 2020, ada penumpukan mata pelajaran Bahasa Inggris, ada guru Agama Islam.
- Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak tidak bisa membaca telah ada kerjasama dengan UNICEF, selama 3 tahun, yang berjalan sudah 1 tahun.
- Raport mutu di Kab. Asmat disetiap sekolah yang menjadi merah karena dari 140 SD yang sudah diasesment 14 sekolah, SMP dan SMA sudah 100%. Yang menjadi kendala Dinas adalah SD.
- Dari 14 sekolah yang diasesment hanya mengukur Calistung (literasi dan numerasi (LN)). Assment dilakukan dengan LN sejauh mana. Kendalanya tidak ada perangkat dan internet, jadi tahun ini bersama tim

anggaran bagaimana menaikkan SPM yang terkait dengan raport, dan salah satunya melalui Asesment, dikarenakan kekurangan fasilitas, dan melalui tim anggaran diperoleh 152 phonebook menggunakan DPA APBD dari kementerian.

- Selanjutnya tindaklanjut dinas menganjurkan untuk semua sekolah memakai dana BOS untuk pembelian Starlink. Sekaloah sdh menganggarkan melalui RKS Dana BOS, dengan harapan dari 14 SD dapat meningkat menjadi 50 SD, dan sudah dikomunikasikan BPMP, klo sampai 50 sdh ada kemajuan yang signifikan.
- Dana Otsus Dinas Pendidikan tahun 2024 dialokasikan ± Rp. 74 Milyar/tahun digunakan kebanyak sarpras dan penggunaannya sudah 100%.
- Untuk SMK 100% OAP, digunakan untuk siswa PKL dibalai besar makassar.
- Untuk ADIK dan ADEM dari Dana Otsus juga digunakan dan tetap diprioritaskan untuk OAP, untuk pemenuhan perlengkapan, uang pengantaran dan juga ada bantuan dari kementerian.
- Mengenai Kepsek yang terjadi penolakan di Kampung-kampung terhadap Kepsek yang satu kampung.
- Langkah-langkah pembenahan terkait penyelesaian masalah-masalah terkait kepala sekolah yang malas berdasarkan laporan dari masyarakat, telah ditindaklanjuti dengan memberhentikan kepala tersebut dan sudah dilaporkan ke pemerintah daerah. Yang menjadi kendala dalam penanganannya adalah sekolah-sekolah yang dipelosok yang jauh tidak ada yang mau kesana seperti perbatasan-perbatasan contohnya dipulau 3 yang berbatasan dengan timika, di korowai yang perbatasan yahokimo, suru-suru. Tidak ada yang mau kesana, karena masalah keselamatan. Dan yang dicari OAP yang berasal dari sana.
- Mengenai RPL sudah dilakukan kerjasama dengan hasil 60 ijazah S1 PAUD walaupun status Honor, dan sudah bisa meningkatkan Raport pendidikan.
- Hasil tindaklanjut akhir tahun dengan GTK sudah ada di DPA dan sudah lakukan kerjasama dengan UNMUS. Untuk SD yang sudah di upload ada

- 17 orang, namun akan dimasukkan ke perubahan Otsus untuk tambahan.
- Dari DPA Dpend ada perekrutan guru dari luar Papua, Medan UNS, Udayana, sebelum perekrutan ada program Pak Bupati, untuk melakukan evaluasi pendidikan selama berdirinya Kab. Asmat, asesment dan evaluasi oleh 2 universitas. Rencana selesai lebaran baru ditindaklanjuti, agar Bupati tahu bahwa beliau beranjak dari bupati ini pendidikan telah berada diposisi/level mana. Dengan adanya kekurangan akan dibuatkan kebijakan, contoh : Sarpras, SDM, Orang tua.
 - Sesuai arahan bupati meminta kerjasama dengan PT yang dituju, dan kedepannya akan dilihat untuk mempertimbangkan UNMUS.
 - Satap di Kab. Asmat dikelola oleh keuskupan.
 - TPP diberikan di Kab. Asmat sesuai Zonasi, yang bersumber dari DAU.
 - Perekrutan guru masih menggunakan DAU, RPL menggunakan OTSUS.
 - Akan ada pembahasan Otsus (Musrembang Otsus) yang akan dilaksanakan di propinsi pada tanggal 11 April 2025.
 - Pembenahan pembangunan rumah guru yang saat ini memasuki tahun ke tiga, dengan sumber anggaran dari Dana Otsus, DAK.
 - Masih ada kendala terkait perumahan guru yang belum semua dapat dipenuhi, terutama pad kampung-kampung yang jauh.
 - Tahun ini DAK yang awalnya dialihkan ke PUPR, namun dikembalikan lagi Ke kementerian pendidikan.dengan nama Revitalisasi Banta yang akan dikirm langsung ke sekolah
 - Kementerian lagi menyusun juknis terkait dengan revitalisasi yang swakelola sekolah. Bukan swakelola sekolah yang langsung ditangani sekolah,tetapi adanya pendampingan dari Dpend.
 - Mulai tahun 2022 bangunan harus beton,
 - Asmat ada memperoleh 7 bangunan dari PUPR, namun masih menunggu Juknis.
 - Dikabupaten kalau hanya mengharapkan Otsus, DAU untuk sarpras susah, sehingga harus diusahakan melalui DAK. Dan DAK dapat tidaknya bersumber dari penarikan data pada DAPODIK. Tidak ada usulan Manual.
 - Ada gebrakan yang dibuat oleh dpend Kab. Asmat, karena melihat adanya sekolah-sekolah terutama pendidikan dasar, SMP,SMA aman.

Untuk pendidikan dasar adanya kepala sekolah yang dalam satu tahun melakukan perubahan operator yang berdampak pada data-data yang hilang. Yang akhirnya operator hanya mengurus dana bos, siswa dan sertifikasi guru (menghasilkan uang), sedangkan yang mendatangkan uang seperti DAK, seharusnya data-data harus diupdate. Berdasarkan akumulasi permasalahan pada jenjang pendidikan dasar tersebut, maka depend mengambil tindakan dengan mengangkat tenaga operator khusus, yang dibayarkan melalui APBD. 1 orang menangani beberapa sekolah, dengan homebase operator berada di dinas pendidikan, agar memudahkan dalam pemantauan, namun sumber data tetap dari kepala sekolah, yang akan di kelola oleh operator yang ditempatkan di depend

- Terkait sekolah gratis di Kab. Asmat sebelum Perbup, telah dilakukan selama ini, dan Perbup ini untuk menegaskan dalam bentuk legalitas secara yuridis agar dapat menjadi tolak ukur MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK
- Sebelum diterbitkannya sudah tidak ada pungutan lagi di sekolah-sekolah (Masuk sekolah gratis, pembagian seragam dana BOS, pemberian makanan gratis dari Pemerintah daerah).
- Adanya pungutan SPP hanya terdapat di dalam kota Asmat untuk sekolah Yayasan, yang sebelumnya ada aturan terkait pungutan pada sekolah-sekolah, namun sudah ada revisi aturan dan memberikan kebebasan pada sekolah swasta. Untuk sekolah negeri sudah sejak lama gratis.
- Sekalipun sekolah negeri gratis, tetapi peserta didik pada Sekolah yayasan/swasta tetap penuh setiap tahun ajaran.
- Walaupun setiap tahun ajaran ada pengaduan kepada Dinas Pendidikan, terkait adanya pungutan pada sekolah Yayasan/swasta, dan diberikan pemahaman bahwa sekolah Yayasan memiliki prosedur dan ketentuan internal selain peraturan pemerintah. Adapun pungutan yang dilakukan oleh pihak yayasan tidak melebihi dari kesepakatan bersama.
- **Terkait Dana Hibah untuk Sekolah Swasta/Yayasan yang bersumber dari APBD** : Sekolah swasta/yayasan membuat pengusulan dalam bentuk Proposal sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah.
- **Menjawab pertanyaan POKJA Papua Sehat** : Ada dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat (APIP), yang lakukan setiap tahun dengan

periode waktu 2 bulan rutin. Dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.

- Apabila ada temuan dalam penggunaan dana BOSP berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan, yang akan ditindaklanjuti melalui sidang majelis Pemerintah Daerah, sebelum pemeriksaan BPK.
- Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dilakukan secara independen, dan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan reviu dan temuan selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan.
- Dampak dan hasil yang diperoleh dari proses pemeriksaan dan pengawasan yang berjalan secara rutin, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Apabila ada sekolah yang bermasalah, maka dinas pendidikan tidak akan melakukan pencairan dana BOS untuk periode selanjutnya.
- Inti dari realisasi Dana BOS, yang pertama dan terutama adalah proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berjalan sebagai dasar pencairan Dana BOS.
- Banyaknya permasalahan pada dinas pendidikan Kab. Asmat, dan sudah dilakukan strategi penyelesaian masalah, dengan pembenahan-pembenahan pada semua aspek (SDM, Sarpras, dll).
- Dana BOS merupakan salah satu pendukung untuk data SPI.
- Perlu adanya interaksi diskusi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan terkait topik sinergitas pendidikan dan kesehatan keluarga dan peserta didik.
- Perlu juga adanya perhatian dari Dinas Perindakop untuk penyediaan kios-kios terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru-guru yang bertugas dikampung-kampung. Karena hampir disemua kampung di pedalaman Kab. Asmat tidak ada kios, sehingga kebanyakan guru-guru kesulitan dalam memenuhi akan kebutuhan pangan dll. Dampak dari kondisi tersebut kebanyakan guru-guru tidak bertugas secara maksimal, dan bahkan ada guru yang mengundurkan diri. [**Case History** : *Ujian Paket di Kampung-kampung tersebut, panitia pelaksana ujian paket membawa sendiri peralatan dapur, seperti kompor, minyak tanah, belanga, wajan, piring, gelas, gula, garam, beras, sayur, dan kebutuhan pangan lainnya,*

serta kbutuhan MCK, yang dibutuhkan dan gunakan selama waktu panitia ujian paket berada di kampung-kampung tersebut. Selain panitia, peserta ujian wajib diberi makan. Dari cerita ini dapat dibayangkan bagaimana dengan waktu tugas guru pada kampung-kampung tersebut]

- Adanya pertemuan antara dinas pendidikan dan dinas sosial terkait sekolah rakyat khusus untuk masyarakat miskin ekstrim sesuai dengan INPRES.
- Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat saat ini Pendidikan menjadi prioritasnya, terbukti dengan adanya dukungan terkait dengan pengembangan prestasi siswa dan peningkatan kualitas pendidikan.
- Sekolah Dasar yang mayoritas 100% siswanya OAP adalah SD Mbait 2, dan SD Mbait 1 ±90%, PAUD, untuk anak-anak putus sekolah di SKB, SMP Mbait, SMA YPPGI Asmat.
- Gambaran Biaya transportasi ke Pusat Distrik Suator Rp. 12.000.000, untuk speed 85 PK, dan selanjutnya untuk biaya ke kampung-kampung di seputar distrik suator ± Rp. 17.000.000,- ditambah biaya driver.
- Adanya Bantuan studi/kelangsungan studi bagi OAP jenjang pendidikan PAUD – SMA/K dari Dinas Provinsi yang bersumber dari dana Otsus, yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun, dimana penyalurannya melalui Pihak Ketiga yaitu Kantor Pos. Namun sampai saat ini tidak ada koordinasi melalui surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan kabupaten Asmat, yang mana agar dalam proses pengawasan bersama. Informasi ini diperoleh dari Kantor Pos. [\[Perlu dikomunikasikan dengan Pihak Terkait\]](#)
- Mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah tahun berjalan, seperti pelaksanaan anggaran tahun 2023 dibayarkan tahun 2024, dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 dibayarkan tahun 2025. Dana tersebut dibagikan langsung ke peserta didik. [\[Butuh penjelasan konkrit dari Pihak Terkait\]](#)
- Adanya website dinas pendidikan Kab. Asmat sebagai media untuk mempublish semua kegiatan pelayanan, dan website tersebut dapat dikunjungi melalui laman berikut : <https://dik.asmatkab.go.id/>

(2) Anggota BPP

- Penjelasan singkat terkait legalitas, tugas dan fungsi BP3OKP dalam mendukung pencapaian Otonomi Khusus Papua.
- Pendidikan yang layak bagi peserta didik OAP, apresiasi yang dalam bagi seluruh sekolah, guru dan tendik.
- Bagaimana pendidikan di KA, dari kota sampai pelosok
- Bagaimana dengan guru2 ,tentang Jumlah guru mengajar dari PAUD, - SMA.
- Bagaimana penyebaran guru-guru, adanya info : ketiga guru mengajar di Swasta, setelah lolos P3K mereka pindah ke sekolah-sekolah negeri.

Perlu disikapi tegas

- Bagaimana pengelolaan Dana Otsus dan DBOD, kami diwajibkan dan diharuskan oleh aturan terkait dengan laporan penggunaan Anggaran Operasional setiap tahun anggaran harus dilaporkan last 31 Maret setiap tahun.
- Harapan kita Kadin Mampu di manage anggaran agar terabsorb 95%, hindari SILPA yang besar, karena akan berdampak pada program berikutnya.
- Pentingnya perencanaan yang maksimal, agar setiap bidang dapat dibiayai secara maksimal.
- BP3OKP mempunyai keleluasaan menyampaikan ke pemerintah pusat (pepus) terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah kami.
- Data-data dari sekolah-sekolah, terkait sekolah aktif, penyebaran guru dll.
- Pengaturan beasiswa, adanya info utk dinas pendidikan dari PAUD-SMA/SMK.
- Tindaklanjut pengembalian pengelolaan SMA/K ke dinas pendidikan PPS oleh Gubernur Papua Selatan sudah dilakukan
- Masalah guru-guru honor, data mohon di share. Honor Sekolah, Kab dan Provinsi
- Adanya usulan pemenuhan kebutuhan guru yang telah dilakukan oleh Pemerinta daerah yaitu Bupati, namun usulan tersebut tidak spesifik sesuai kebutuhan.
- Data guru PNS, P3K, Honor ada berapa banyak? Dan kebutuhan guru

untuk tahun 2025 berapa banyak? Dan usulan dilakukan secara berjenjang disampaikan ke Pusat.

- Tahun lalu Bupati Asmat, Merauke, BODI, tidak merespon surat dari BAKN dan PAN RB dan yang merespon hanya PJ Bupati Mappi sehingga Mappi mendapat kuota 2500. Mohon menjadi perhatian!!!
- Semoga di Tahun ini jangan terulang, dan harus secara spesifik disampaikan sesuai kebutuhan.
- Penyebab saudara-saudara kita demo, karena adanya ketidaksesuaian usulan kebutuhan sesuai dengan kriteria.
- Tujuannya adalah untuk pembinaan SDM OAP non skill, kira-kira dapat ditempatkan dimana saja untuk pembinaan selanjutnya. Harusnya adanya konsep dari Kepala Daerah secara berjenjang, sehingga tidak menimbulkan keresahan SDM OAP.
- Pokja Papua Cerdas melakukan diskusi terkait dengan pendidikan.
- Kondisi pendidikan saat ini di Kab. Asmat yang terjadi seperti apa, agar jangan ada kesan siswa SMP belum bisa baca tulis, sesuai info dari ketua DPR K. dan selain itu anak usia sekolah tidak dapat bersekolah karena belum mempunyai Akte Kelahiran. Solusinya : Bicarakan dengan dukcapil agar menjadi perhatian.
- Kompensasi untuk guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, dalam proses usulan ke pemerintah pusat. Dan apabila disetujui, maka Pemda melalui Dinas Pendidikan untuk menyusun instrumen kontrol dan pengawasan bagi guru-guru tersebut.
- Konteks Dana Otsus diharapkan hanya beredar di Papua Saja, namun tetap mempertimbangkan masalah kualitas.
- Arahan untuk FKIP melalui kegiatan PPL dari Unmus, bisa disebar keseluruh Kabupaten, rekomendasi 6 bulan.
- Untuk rekrut guru-guru, jika OAP tidak mampu mendidik anak-anak didik OAP. Harusnya membuka peluang untuk datangkan guru-guru dari luar, dan terkait pembiayaan apakah DIPA Daerah atau kementerian, namun belum ada solusi.
- Langkah-lanhhkah pembenahan yang dilakukan untuk pendidik OAP yang melakukan pelanggaran dalam mendidik.
- Tindaqklanjut penanganan terkait meningkatkan sistem pembelajaran,

dengan catatan harus ada asrama-asrama.

- Efektifnya Pendidikan Pola Asrama dapat diselenggarakan dengan baik melalui Gereja-gereja atau pesantren. melalui pola ini peserta didik akan memperoleh 3 hal dalam membentuk karakter yaitu : Iman, Morak dan Pendidikan dan juga memberikan didikan soal bertanggungjawab.
- Untuk starlink mohon dibuatkan Mapping, dimana saja titik-titik pemasangan, dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Kominfo.
- Warning penggunaan Dana Otsus sesuaikan dengan PMK 33 Tahun 2024.
- Terkait keputusan Bupati untuk pembebasan biaya pendidikan pada sekolah Negeri, namun perlu dipertimbangkan juga terkait dampak pada sekolah-sekolah swasta. Tetap dapat dilakukan adanya pendekatan dan distribusi/subsid dari Wali murid, dan diharapkan juga ada subsidi dari pemda melalui Dana Otsus, agar sekolah swasta tetap beroperasi.
- Perlu ada tindaklanjut secara khusus dan akan dibicarakan pada tingkat provinsi maupun tk pusat.
- Harapan dalam penggunaan dana BOS, digunakan oleh sekolah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- Terkait koordinasi dengan perindakop untuk pemenuhan kios-kios di kampung-kampung di pedalaman Kab. Asmat, akan ditindaklanjuti dengan komunikasi antara Anggota BPP-PPS dan Pemerintah Provinsi, BUMD terkait.
- Akan ditindaklanjuti untuk PPS diberikan bantuan kapal (Kapal ampibi), yang dapat mengarungi lautan/sungai dangkal, yang diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan 3 kabupaten (Merauke, Asmat dan Mappi). Tujuannya agar guru-guru dan nakes tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam pelaksanaan tugasnya di kampun-kampung. Hasil diskusi Musrembang Nasional, pengadaanya di rencanakan tahun 2025.

(3) Anggota Pokja Papua Cerdas

- Sinkronisasi, harmonisasi data pendidikan Kab. Asmat mendukung pencapaian Papua Cerdas.
- Terkait status pegawai dan pendidikan Guru pengaturan di PP No. 106

Tahun 2021.

- Perlu adanya koordinasi dengan badan akreditasi terkait proses asesmen melalui badan akreditasi.
- Perlu adanya pembenahan terkait pemenuhan data siswa yang putus sekolah.

(4) Kepala Bidang PPNF

- Mandatory Spending Dinas Pendidikan, saat di MKQ membahas Otsus, di Kab. Asmat dikatakan Dpend dikatakan dananya paling besar. Alangkah baiknya untuk fisik sebaiknya terpisah langsung ke PUPR, supaya MS piur digunakan untuk anak2 OAP.
- Diharapkan dpend tidak lagi menangani fisik, namun hanya mengusulkan sesuai kebutuhan pembangunan fisik sekolah, agar Dana Otsus pendidikan yang 30% dihibahkan lagi untuk pembangunan fisik. Perlu dibicarakan agar Dana Otsus Pendidikan tepat sasaran.
- RPL khususnya untuk OAP yg saat ini rata-rata yang sudah mengajar 5-6 tahun bahkan 10 thn ttp dibayar honornya Rp. 1.300.000,-, karena mereka masuk dengan status guru pendamping bukan guru utama, khusus di TK PAUD. SD semua sudah diatas UMR, selanjutnya untuk guru pendamping TK PAUD bagaimana mau meningkatkan kompetensi/pendidikan mereka. Agak kewalahan. Tahun lalu ada kerjasama dengan UNY, namun OAP hanya sedikit, makanya waktu musrembang sdh diminta perhatian untuk guru-guru TK PAUD yang masih memiliki ijazah SMA, Mereka mau ikut RPL, dan di Unmus sudah ada legalitasnya. Mohon di dorong guru2 TK PAUD, karena di KA Guru TK PAUD yang sdh PNS hanya 5 orang 1 kabupaten, lainnya masih honor. Yang lulus kerjasama RPL dengan UNY ada 43 orang. Sekarang sudah bertambah 60 orng dengan status honor semua.
- Kenapa Usia sekolah rata-rata angka partisipasi kasarnya lebih besar di asmat daripada APMnya, yang pertama anak mau datang sekolah kalau tidak makan, harus dirangsang dengan pemberian makan anak sekolah, dan KA sudah dibuat sebelum program Presiden/Nasional dan masih berjalan sampai sekarang. Hasilnya kelas tidak mampu menampung siswa, namun kondisi ini berlangsung sampai covid, dan saat ini tetap

berjalan tetapi terbatas beberapa sekolah yang siswanya mayoritas OAP (TK), pemda siapkan makan setiap hari.

- Untuk pemberantasan buta huruf dilakukan melalui SKB yang mayoritas peserta didiknya OAP dengan perlakuan khusus, diantaranya pagi hari mereka di jemput, dikasih mandi disekolah dan diberi pakaian khusus digunakan saat PBM berlangsung dan sumber dananya dari Pemprov PS Dana Otsus dari kantor POS. Khusus SKB tidak diijinkan dibagikan ke anak, karena kalau diinformasikan ke anak, maka orang tuanya yang akan datang, dan seringkali disalahgunakan Jadi Kepala SKB yang kelola dan dibuatkan jadwal setiap hari untuk pemebrian makanan dengan sisa dari itu belikan seragam yang ditingal disekolah yang digunakan saat PBM berlangsung. Dan yang mencuci pakaian-pakaian tersebut adalah guru-guru SKB dengan dibantu Fasilitas Laundry. [Pakaian seragam akan diberikan saat pagi hari setelah mereka mandi dan digunakan saat PBM berlangsung, dan setelah itu saat mereka akan pulang pakain tersebut ditinggal disekolah dan mereka kembali gunakan pakaian yang mereka gunakan dari rumah mereka]. Adapun kesulitan yang dialami oleh pengelola SKB diantaranya saat penjemputan masih ada siswa yang tidak didukung oleh orang tua dengan kasus masih ada yang masih tidur dan dibiarkan oleh orang tuanya, sekalipun yang menjemput sudah bekerjasama dengan pihak TNI dan POLISI.
- Hari sabtu murid dan guru SKB mencuci pakaian siswa tersebut,
- Setiap tahun harus mengalokasikan dana sekitar 30 M lebih untuk membayar honor guru, kenyataanya mereka dipetakan atau dibayar per daerah keterjangkauan terjauh dan dekat, dan sudah dilakukan, namun dilapangan guru-guru tidak mau ke tempat tugas, dikarenakan Kepala sekolah tidak berada di tempat, bagaimana guru bantu akan mau kesana, kedua : keterkaitan dengan ketersediaan bahan makanan dan pendukung kehidupan guru yang tidak tersedia di kampung-kampung tersebut, sekalipun honor besar tetapi tidak dapat bertahan hidup krn tidak ada kios, dan permasalahan lain jika guru beranjak ke distrik atau kabupaten untuk belanja, konsekuensinya, semua barang isi rumah akan dijarah, “Guru Dilema”.
- Rata-rata masyarakat dikampung tersebut tidak mau menerima guru yang

berasal dari kampung tersebut, dan mereka mau dari pendatang. Untuk jadi kepala sekolah.

- Dulu saat ada program sarjana mengajar (SM3T) semua sekolah berjalan, menjadi pembelajaran, maka dpnd membuat satgas literasi. Awalnya kepala dinas pendidikan PPS Bpk Alo Yopen, beliau gaungkan Guru satgas literasi, yang mengajar pada kelas kecil yi kls 1,2,3. Tetapi teknik mengajar yang harus diajarkan kepada satgas tersebut. Karena semua guru tidak paham tentang mengajar pada kelas kecil, faktanya guru mengajar untuk kelas 1 datang langsung tulis A...apakah berdampak?. Perlunya teknik khusus. Dan pernah adanya pelatihan bagaimana cara mengajar literasi dan numerasi dikelas kecil. Hal ini asmat, Pemerintah RI mengutus UNICEF dalam kerjasama dengan KA selama 3 tahun dengan sumber dana dari pemerintah Australia. Sekarang terbukti di kota agats anak kelas 1,2, 3 sudah bisa membaca, termasuk didistrik. Guru wajib tau cara mengajar kelas kecil.
- Untuk kedepannya kalau asmat mau diterapkan sekolah yang utuh dikampung2 agak susah, harus dilakukan melalui kelas kecil sehingga dapat menghemat guru dan sekaligus menghemat anggaran.
- Setelah kelas 4 akan digiring ke ibukota distrik dan disitulah dibangun sekolah pola Asrama. Membutuhkan orang yang profesional mengelola asrama dengan baik.
- Layanan kesehatan, TK PAUD terjadwal mellaui surat dari sekolah ke Dinas Kesehatan.
- Identitas anak, sudah aa MoU antara Dpend dengan Dukcapil, dengan koordinasi dengan orang tua.
- Untuk Satgas Literasi direkrut untuk S1 Pendidikan untuk mengajar SD, statusnya satgas dan kedepannya ybs betul-betul mengabdikan, maka akan diprioritaskan untuk PPG, sehingga dengan PPG yang merupakan salah satu syarat lulus P3K, spy ybs ada jaminan masa depan. Masalahnya mencari orang yang sulit
- Solusi alternatif adanya kerjasama melalui SM3T yang dari UPI Bandung dan Medan, mereka betah dengan ikatan dinas selama 2 tahun dan saat mereka pulang masyarakat menangis minta mereka tidak boleh pulang. Dan berbanding terbalik dengan guru kontrak lokal.

- Alokasi DAK melalui aplikasi Dapodik, kalau disekolah Formal namanya Dapodik, dan PNF Dapodik masa.
- Untuk mendorong mendapatkan dana bantuan khusus untuk fisik agak susah, karena terbentur dengan aturan, dan aturan dari kementerian menyatakan bahwa kalau sekolah itu akan mendapatkan alokasi DAK untuk fisik minimal akreditasinya B, apalagi kalau sekolah yayasan harus akreditasinya A. sementara keadaan disini, rata-rata dilakukan visitasi utk akreditasi untuk sekolah yang berada di perkotaan dari 5 sekolah mungkin hanya 1 yang mendapatkan akreditasi “A”. yang lain “C”. berdasarkan hal ini, bagaimana pemerintah dapat mendongkrak pembangunan di KA, sementara bahan utama untuk pembangunan adalah kayu, semoga hal ini dapat dipertimbangkan khusus di Asmat, karena sangat sulit memperoleh akriditasi B atau A.
- Persyaratan harus Wajib lainnya adalah sertifikat tanah, sementara di asmat Badan Pertanahan tidak ada, sedangkan untuk pelepasan guru-guru minta kesana untuk mengupload, masyarakat palang lagi, dengan tuntutan pembayaran. Solusinya melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.
- Untuk KA mulai tahun 2025 ada peraturan Bupati tentang pembebasan biaya pendidikan, SD Negeri 100% bebas biaya pendidikan (untuk semua administrasi). Untuk Yayasan ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, SPP sesuai dengan kemampuan Wali Murid, sesuai rapat komite.
- **Tambahan Terkait pungutan sekolah swasta/yayasan :** Sesuai dengan revisi peraturan, dikembalikan kembalikan pada pihak yayasan dengan ketentuan maksimal yang dipungut dari siswa. Namun ada solusinya, misalnya guru honor yayasan pembayaran honorinya terakomodir semua ke APBD, pengadaan, pembangunan Sarpras, termasuk seragam sekolah bagi yayasan/swasta yang tidak mampu dapat melakukan pengajuan kepada Dinas Pendidikan Kab. Asmat, agar dimasukkan dalam APBD dalam bentuk Dana Hibah.
- **Solusi terkait kekurangan biaya pada sekolah swasta, yang dilakukan dengan Proposal usulan dana hibah dari Pemerintah, disebabkan :** Karena alokasi BOSP khusus Kab. Asmat untuk tahun

2025 ada kenaikan. Dengan rincian pembiayaan pada jenjang Sekolah Dasar persiswa ± Rp. 3.000.000/tahun (mengalami kenaikan 2 akli lipat) seluruh Indonesia. Dengan pembagian perzona, jadi anak tidak perlu melakukan pembayaran lagi.

(5) POKJA Papua Sehat

- Terkait masalah akreditasi oleh Kabid PNF : Perlu dibuatkan telaah sesuai letak geografis/situasi, karena std yang dikota dan pedalaman berbeda. Di Asmat, disesuaikan dengan ketersediaan, agar ada excuse untuk pembangunan.
- Fisik di Dpend masih berproses, yang artinya anggarannya belum tersalur ya?
- Terkait realisasi Visi, Misi Bupati baiknya jangan lupa untuk mengacu pada RIPPP!!!.
- **Pertanyaan terkait kenaikan dana BOSP Tahun 2025** : Bagaimana dengan dana BOSP yang lancar, namun operasional sekolah tidak berjalan, apakah ada pengawasan dari dinas pendidikan dan dinas mana saja?.
- **Usul kesulitan pemenuhan kebutuhan guru yang bertugas di kampung-kampung yang tidak ada kios** : Sebaiknya adanya kerjasama antara dinas kesehatan dan dinas pendidikan untuk penyediaan Speedboat dengan dukungan anggaran kerjasama, agar dapat digunakan bersama untuk sarana pemenuhan kebutuhan masing-masing.

(6) Sekretaris Dinas

- Terkait biaya pada sekolah swasta dimana pungutan biaya sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak Wali

3) Kunjungan Sekolah-sekolah. Rabu, 19 Maret 2025

a. SD Persiapan Negeri Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat

Kunjungan kerja yang dilakukan Anggota BPP dan POKJA BPP-PPS pada SD Persiapan Negeri Mbait 2 bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan belajar, peserta didik mayoritas OAP, ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, ketersediaan tenaga guru dan tendik. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- (1) Perkenalan Anggota BBP dan POKJA pada Kepala sekolah, guru dan tendik beserta seluruh siswa kelas 1- 6 yang betepatan dengan adanya pembagian makanan dan perlengkapan sekolah pada siswa oleh Pihak Aparat TNI Kabupaten Asmat.
- (2) Sambutan, arahan dan motivasi oleh anggota BPP – PPS kepada para siswa
- (3) Diskusi singkat bersama guru dan tendik
- (4) Dialog dan tanya jawab oleh anggota BPP bersama pada siswa

Berdasarkan hasil kegiatan kunjungan yang diperoleh sbb :

- (1) Kegiatan Belajar Menajar: Lancar
- (2) Peserta didik : 545 Siswa 99% OAP
- (3) Ketersediaan tenaga guru : Link Dapodik
<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/BD1EED328B539D4EF5B6>
- (4) Sarana Prasarana : Link Dapodik
<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/BD1EED328B539D4EF5B6>

b. SMP Negeri Mbait Kabupaten Asmat

Kunjungan kerja yang dilakukan Anggota BPP dan POKJA BPP-PPS pada SMP Negeri Mbait bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan belajar, peserta didik mayoritas OAP, ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, ketersediaan tenaga guru dan tendik. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- (1) Perkenalan Anggota BBP dan POKJA pada Kepala sekolah, guru dan tendik beserta seluruh siswa kelas VII-IX
- (2) Sambutan, arahan dan motivasi oleh anggota BPP – PPS kepada para siswa
- (3) Diskusi singkat bersama guru dan tendik
- (4) Dialog dan tanya jawab oleh anggota BPP bersama pada siswa

Berdasarkan hasil kegiatan kunjungan yang diperoleh sbb :

- (1) Kegiatan Belajar Menajar: Lancar
- (2) Peserta didik : 545 Siswa 99% OAP
- (3) Ketersediaan tenaga guru : Link Dapodik
<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/6D22EF28B5E2BA8AC9E5>
- (4) Sarana Prasarana : Link Dapodik

c. PAUD Cahaya Kasih Bunda Kabupaten Asmat

Kunjungan kerja yang dilakukan Anggota BPP dan POKJA BPP-PPS pada PAUD Cahaya Kasih Bunda Asmat bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan belajar, peserta didik mayoritas OAP, ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, ketersediaan tenaga guru dan tendik. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- (1) Perkenalan Anggota BBP dan POKJA pada Kepala sekolah, guru dan tendik beserta seluruh siswa.
- (2) Diskusi singkat bersama guru dan tendik
- (3) Anggota BPP dan Pokja menyapa dan bermain bersama pada siswa

Berdasarkan hasil kegiatan kunjungan yang diperoleh sbb :

- (1) Kegiatan Belajar Mengejar: Lancar
- (2) Peserta didik : 99 Siswa 99% OAP
- (3) Ketersediaan tenaga guru : Link Dapodik

<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/EA349FE362483F7C649D>

- (4) Sarana Prasarana : Link Dapodik

<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/EA349FE362483F7C649D>

d. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Asmat

Kunjungan kerja yang dilakukan Anggota BPP dan POKJA BPP-PPS pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Asmat bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan belajar, peserta didik mayoritas OAP, ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, ketersediaan tenaga guru dan tendik. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- (1) Perkenalan Anggota BBP dan POKJA pada Kepala sekolah, guru dan tendik beserta seluruh siswa.
- (2) Diskusi singkat bersama guru dan tendik
- (3) Anggota BPP dan Pokja menyapa dan bermain bersama pada siswa

Berdasarkan hasil kegiatan kunjungan yang diperoleh sbb :

- (1) Kegiatan Belajar Mengejar: Lancar
- (2) Peserta didik : 3.590 Siswa 100% OAP
- (3) Ketersediaan tenaga guru : Link Dapodik

<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/ABD5223D112C7419BFCA>

3. Evalauasi dan Reviu Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat. Kamis, 20 Maret 2025

Pelaksanaan Evaluasi dan Reviu pelaksanaan program dan rencana kerja terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, bertujuan untuk melakukan SHEK sesuai dengan Tugas dan fungsi POKJA Papua Cerdas. Berdasarkan tujuan di atas diharapkan hasil evaluasi dan reviu dapat memberikan informasi bahwa program yang telah dijalankan given dengan regulasi OTSUS Papua.

Selanjutnya apabila dalam evaluasi dan reviu masih belum selaras, maka anggota BPP dan Pokja BPP-PPS, akan memberikan arahan dan petunjuk untuk program selanjutnya di selaraskan dengan regulasi OTSUS Papua. Dalam proses reviu dan evaluasi ini, diharapkan adanya dokumen-dokumen legal terkait dengan Rencana Program dan Realisasi Program Kegiatan Anggaran secara garis besar seperti yang terlihat pada uraian berikut.

1) Dokumen Rencana Program Kegiatan

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan pendidikan yang disusun secara berjenjang dan terstruktur. Berikut adalah urutan dokumen tersebut:

- (1) **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD):** Dokumen ini menetapkan arah pembangunan daerah untuk jangka panjang, biasanya mencakup periode 20 tahun. RPJPD Kabupaten Asmat untuk periode 2025-2045 telah disusun dan disahkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2023.
- (2) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):** RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 tahun. RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
- (3) **Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD):** Renstra OPD adalah dokumen yang memuat rencana strategis masing-masing perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, untuk mendukung pencapaian RPJMD. Renstra OPD Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 telah

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 71A Tahun 2021.

- (4) **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** RKPD adalah dokumen tahunan yang memuat rencana kerja pemerintah daerah, termasuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut, sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra OPD.
- (5) **Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) OPD:** Renja OPD adalah dokumen yang memuat rencana kerja dan anggaran masing-masing perangkat daerah untuk tahun anggaran tertentu, sebagai penjabaran dari Renstra OPD dan RKPD

2) **Dokumen Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran**

Pemenuhan pelaporan realisasi program kegiatan dan anggaran pembangunan pendidikan membutuhkan dokumen secara terstruktur, sistematis, akuntabel dan transparan untuk merealisasikan program dan anggaran pembangunan pendidikan. Berikut adalah urutan dokumen yang terkait:

- (1) **Peraturan Bupati (Perbup):** Dokumen yang mengatur petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan, seperti:
 - a. Perbup Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pemerintah Kabupaten Asmat.
 - b. Perbup Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakaraan Otsus pada Satuan Pendidikan Kesenakaraan di Kabupaten Asmat.
 - c. Perbup Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Dokumen yang menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk program-program pendidikan.
- (3) **Laporan Kinerja:** Dokumen yang menjelaskan capaian kinerja dari program-program pendidikan yang telah dilaksanakan, termasuk indikator keberhasilan dan hambatan yang dihadapi.

Hasil yang diperoleh dengan presentasi dan dokumen yang disampaikan oleh beberapa bidang dari dinas pendidikan Kabupaten Asmat, sebagian besar program tahun

2024 yang telah terlaksana, walaupun pencapaian yang diperoleh belum maksimal. Secara berurutan bidang-bidang yang telah menyampaikan laporan melalui presentasi, sebagai berikut :

1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar – Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Laporan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, merupakan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, oleh seksi-seksi pada bidang pembinaan pendidikan dasar. Presentasi laporan yang disampaikan terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :

a. Program Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMAS) [1]

(1) Tujuan dari program PMAS ini, adalah :

- Peningkatan Gizi Anak : Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Asmat, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.
- Meningkatkan Prestasi Belajar: Dengan asupan gizi yang baik, diharapkan anak-anak dapat lebih fokus dan berprestasi di sekolah.
- Mengurangi Angka Stunting: Salah satu tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk mengurangi angka stunting (kekurangan gizi kronis) di Kabupaten Asmat.

(2) Sasaran dan Kouta

- Sasaran pelaksanaan siswa-siswi sekolah dasar di Kabpuaten Asmat.
- Sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka pelaksanaan program PMAS tahun 2024, masih terbatas pada 16 Sekolah Dasar (SD) $\pm$ 16% dari total 140 SD pada sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Asmat.

(3) Ketersediaan dan Realisasi Anggaran

- Jumlah pagu anggaran tahun 2024 yang dialokasikan dalam APBD Dinas Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp 2.160.000.000,00, yang telah terealisasi sebesar Rp 1.944.914.070,00
- Jumlah pagu anggaran tahun 2025 yang dialokasikan dalam APBD Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.182.760.000, sementara yang telah terealisasi sebesar Rp 679.482.180 untuk tahap Pertama

(4) Kesenjangan Pelaksanaan Program

- Menu makanan yang disediakan dalam program pemberian makanan bagi anak sekolah terkadang tidak sesuai dengan rekomendasi menu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis (juknis), sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan program.
- Keterbatasan ketersediaan bahan makanan di wilayah tertentu mengakibatkan perlunya pengambilan bahan makanan dari kota Agats, yang berdampak pada peningkatan biaya operasional program

b. Program Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) [2]

- (1) Tujuan dari program ADEM ini, adalah :
 - Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu bagi Masyarakat usia sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan oleh geografis dan ekonomi.
 - Meningkatkan minat dan motivasi anak sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi.
 - Mendukung percepatan Pembangunan sumber daya manusia di provinsi yang memiliki kendala hambatan geografis dan ekonomi dalam hal mengakses Pendidikan.
- (2) Sasaran dan Kouta
 - Jumlah kuota Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) adalah 12 SISWA yang ditujukan bagi putra-putri asli papua lulusan Pendidikan SMP sederajat serta memiliki potensi akademik baik.
- (5) Ketersediaan dan Realisasi Anggaran
 - Jumlah pagu anggaran tahun 2024 yang dialokasikan dalam APBD Dinas Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp. 558.944.000, yang telah terealisasi sebesar Rp. 510.974.353
 - Jumlah pagu anggaran tahun 2025 yang dialokasikan dalam APBD Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebesar Rp. 520.249.000, Untuk realisasi belum terlaksana
- (6) Kesenjangan Pelaksanaan Program
 - Banyaknya peminat seleksi dengan keterbatasan kuota yang diberikan oleh Provinsi menjadi hambatan bagi siswa/I untuk mengikuti program

ini.

- Dengan seleksi administrasi secara online menjadi kendala karena jaringan internet yang tidak mumpuni sehingga banyak peserta yang tidak dapat menyelesaikan upload data hingga batas waktu yang ditentukan.
- Karena kendala transportasi antara kabupaten dan provinsi, calon peserta ADEM tiba lebih cepat, mendahului penyelenggara dan melampaui jadwal pembekalan yang sudah direncanakan

Tanggapan hasil revidu dan evaluasi oleh Anggota Pokja Papua Cerdas BPP-PPS pada Laporan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar – Sie Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam 2 realisasi kegiatan di atas diperoleh hasil, sebagai berikut :

- (1) Belum ada dokumen Program Kerja Tahun 2024 yang disampaikan
- (2) Belum ada penjelasan tentang rasio pencapaian antara program dan realisasi, baik dari aktivitas, waktu dan pembiayaan
- (3) Belum adanya penjelasan secara rinci tentang presentasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat melalui bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dan belum ada penjelasan terkait penyerapan dana otsus pada bidang ini.
- (4) Belum ada penjelasan tingkat pencapaian dan keberhasilan program berdasarkan akumulasi program kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perlu dijelaskan dalam bentuk grafik pencapaian.
- (5) Belum ada penjelasan tentang dampak dari program kegiatan dan anggaran yang ditimbulkan terhadap kemajuan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asmat.
- (6) Belum ada penjelasan tentang rencana tindaklanjut permasalahan sebagai dasar penyusunan program tahun 2025, terkait dengan keberlanjutan ke dua kegiatan di atas.

2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar – Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Laporan yang disampaikan pada seksi ini berupa dokumen presentasi dan matriks tabulasi pengadaan dan sarana prasarana yang telah dilakukan pada periode 2022-2025

di Kabupaten Asmat, adapun dokumen-dokumen dapat dilihat pada link berikut

<https://shorturl.at/Ua86L>.

Mengingat keterbatasan waktu saat proses rewiu dan evaluasi, sehingga dari seksi kelembagaan dan sarana prasarana belum dapat mepresentasikan laporan pelaksanaan program yang telah dilakukan. Karena belum dipresentasikan maka, kami hanya dapat mendokumentasikan arsip yang diberikan.

Tanggapan hasil rewiu dan evaluasi oleh Anggota Pokja Papua Cerdas BPP-PPS pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Sie Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Kelembagaan dan Sarana Prasarana, diperoleh hasil identifikasi kelengkapan materi dan dokumen pelaksanaan program sebagai berikut :

- (1) Belum ada dokumen Program Kerja Tahun 2024 yang disampaikan
- (2) Belum ada penjelasan tentang rasio pencapaian antara program dan realisasi, baik dari aktivitas, waktu dan pembiayaan
- (3) Belum adanya dokumen dan penjelasan secara rinci klasifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran.
- (4) Belum ada penjelasan tentang dampak dari program kegiatan dan anggaran yang ditimbulkan terhadap kemajuan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asmat.
- (5) Belum ada penjelasan terkait keunggulan dan permasalahan dalam pelaksanaan program.
- (6) Belum ada penjelasan tentang rencana tindaklanjut permasalahan sebagai dasar penyusunan program tahun 2025, terkait dengan keberlanjutan ke dua kegiatan di atas.

3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Laporan yang disampaikan oleh Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, merupakan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Adapun ringkasan laporan yang disampaikan, sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja adalah rangkaian rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Realisasi program kerja adalah kegiatan yang telah dilaksanakan, dan program kerja melalui kegiatan/aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat melalui bidang PAUD dan PNF pada tahun 2024 secara garis besar, terlihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Realisasi Program melalui aktivitas bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Asmat Tahun 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS/ KATEGORI
I. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1.	Pengadaan Mebel PAUD	Fisik
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Non Fisik
3.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Non Fisik
4.	Pengembangan Karir PTK pada Satuan Pendidikan PAUD	Non Fisik
5.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Fisik
II. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
1.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Non Fisik
2.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Non Fisik

b. Anggaran dan Biaya

Anggaran dan biaya yang diperoleh dan direalisasikan berdasarkan kebutuhan rencana kegiatan yang tersusun dalam program kerja guna pencapaian target yang diharapkan. Anggaran dan biaya yang dimaksud disini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan bidang pendidikan di Kabupaten Asmat. Adapun rincian anggaran dan biaya yang diuraikan khusus pada bidang PAUD dan PNF, terinci berikut :

(1) Anggaran dan biaya Pelaksanaan Dana Otsus 2024

- ☀ Total Dana Otsus : Rp 9.285.238.117,-
- ☀ Realisasi Penyerapan : Rp 8.521.715.589,-

☀ Persentase Penyerapan : 91,78 %

(2) Anggaran dan biaya Pendidikan anak usia dini (PAUD)

☀ Total Dana Otsus : Rp 7.207.719.860,-

☀ Realisasi Penyerapan : Rp 6.569.710.576,-

☀ Persentase Penyerapan : 91,15 %

(3) Anggaran dan biaya Pendidikan Non Formal (PNF)

☀ Total Dana Otsus : Rp 2.077.518.257,-

☀ Realisasi Penyerapan : Rp 1.952.005.013,-

☀ Persentase Penyerapan : 93,96 %

Rincian penggunaan anggaran dalam kegiatan program bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Rincian Realisasi Anggaran Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab.
Asmat Tahun 2024

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	% PENYERAPAN
	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PENYERAPAN (Rp)	
I.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.207.719.860	6.569.710.576	91,15
1.	Pengadaan Mebel PAUD	102.300.000	102.256.620	99,96
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.952.000.000	1.951.437.651	99,97
3.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.219.460.000	1.895.780.000	85,42
4.	Pengembangan Karir PTK pada Satuan Pendidikan PAUD	356.612.000	318.753.289	89,38
5.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.577.347.860	2.301.483.016	89,30

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	% PENYERAPAN
	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PENYERAPAN (Rp)	
II.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.077.518.257	1.952.005.013	93,96
1.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	807.418.257	807.303.603	99,99
2.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.270.100.000	1.144.701.410	90,13
	JUMLAH	9.285.238.117	8.521.715.589	91,78

c. Evaluasi

Pelaksanaan program dan anggaran pada bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya belum mencapai 100%. Berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan Kabupaten Asmat dan juga telah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu APIP, diperoleh penyebab pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang kurang dari 100%, dikarenakan adanya kendala dan permasalahan sebagai berikut [3]:

- (1) Keterbatasan dana untuk makan dan minum anak
- (2) Pemahaman orang tua terhadap pentingnya Pendidikan sangat rendah
- (3) Orang tua sering membawa anak ke kampung
- (4) Alokasi anggaran untuk guru TK/Paud melanjutkan Pendidikan S1 belum memadai
- (5) Ketersediaan sarana dan prasarana satuan PAUD belum memenuhi syarat dan Sebagian besar meminjam Gedung balai kampung dan gereja

**Tanggapan hasil rewiu dan Evaluasi oleh Anggota Pokja Papua Cerdas BPP-PPS
Pada Bidang PAUD dan PNF**

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rincian realiasasi kegiatan di atas sesuai domen [3] diperoleh hasil, sebagai berikut :

- (1) Belum ada dokumen Program Kerja Tahun 2024 yang disampaikan
- (2) Dokumen dan presentasi yang disampaikan sebatas Kegiatan program dan realisasi anggaran, terbatas pada alokasi penggunaan Dana Otsus.
- (3) Belum ada penjelasan tentang rasio pencapaian antara program dan realisasi, baik dari aktivitas, waktu dan pembiayaan
- (4) Belum ada penjelasan tingkat pencapaian dan keberhasilan program berdasarkan akumulasi program kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perlu dijelaskan dalam bentuk grafik pencapaian.
- (5) Belum ada penjelasan tentang dampak dari program kegiatan dan anggaran yang ditimbulkan terhadap kemajuan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asmat.
- (6) Belum ada penjelasan tentang rencana tindak lanjut permasalahan sebagai dasar penyusunan program tahun 2025, terkait dengan keberlanjutan ke dua kegiatan di atas.

4) Pengelolaan BOSP

a. Dasar Hukum

Pengelolaan BOSP Di Lingkungan Kabupaten Asmat dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (3) Peraturan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Satuan pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Asmat.

b. Penerimaan dan Realisasi BOSP

Laporan tentang pengelolaan BOSP Kabupaten Asmat yang disampaikan kepada Anggota BPP dan POKJA Papua Cerdas berupa dokumen presentasi. Adapun data-data yang diperoleh dari dokumen yang diberikan terkait dengan penerimaan dan realisasi BOSP terlihat pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 di bawah.

Tabel 4 Penerimaan BOSP Tahun 2024

Bentuk Sekolah	Nilai Persiswa	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	1.870.000	9.457.724.340	9.849.183.500	39.306.907.840
SMP	2.330.000	7.299.353.700	1.462.810.000	8.762.163.700
SMA	3.180.000	3.564.256.000	1.642.002.000	5.206.258.000
SMK	3.380.000	814.136.000	-	814.136.000
TOTAL		41.135.470.040	12.953.995.500	54.089.465.540

Tabel 5 Penerimaan BOSP Tahun 2025

Bentuk Sekolah	Nilai Persiswa	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	2.384.000	30.512.192.000	11.164.998.000	41.677.190.000
SMP	2.969.000	9.559.057.000	1.995.168.000	11.554.225.000
SMA	4.053.000	3.934.242.000	1.752.942.000	5.687.184.000
SMK	3.380.000	831.480.000	-	831.480.000
TOTAL		44.836.971.000	14.913.108.000	59.750.079.000

Penerimaan BOSP pada tabel 4 & 5, terlihat adanya kenaikan anggaran.

Tabel 6 Realisasi BOSP Tahun anggaran 2024

Bentuk Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan TA 2024	Total Penerimaan TA 2024	Realisasi			Jumlah	Saldo Akhir
				5.2.1	5.2.2	5.2.3		
SD	167.105.529	39.306.907.840	39.474.013.369	7.342.060.613	26.695.602.217	4.384.962.370	38.422.625.200	1.051.388.169
SMP	132.381.142	8.762.163.700	8.894.544.842	1.674.370.300	5.285.668.960	1.913.494.740	8.873.534.000	21.010.842
SMA	7.840.230	5.206.258.000	5.214.098.230	1.107.611.500	3.171.389.313	926.681.187	5.205.682.000	8.416.230
SMK	483.879	814.136.000	814.619.879	216.860.000	472.503.896	124.628.104	813.992.000	627.879
TOTAL	307.810.780	54.089.465.540	54.397.276.320	10.340.902.413	35.625.164.386	7.349.766.401	53.315.833.200	1.081.443.120

c. Satuan Pendidikan Pada Kabupaten Asmat

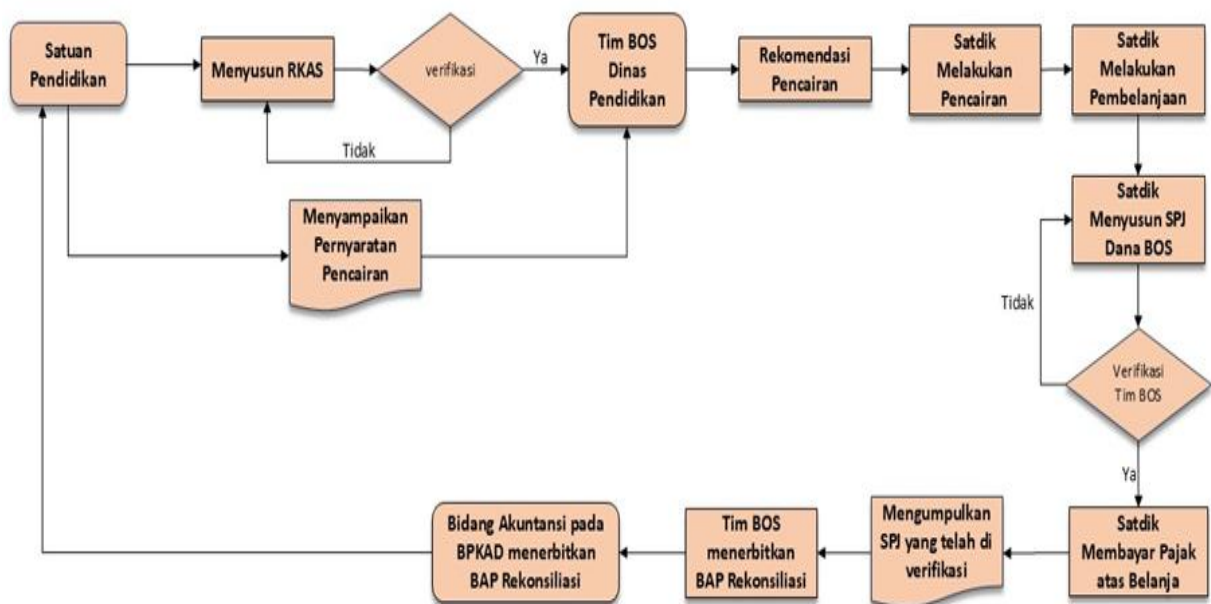
Penerimaan dan realisasi anggaran diperuntukkan pada satuan pendidikan di Kabupaten Asmat. Adapun data satuan pendidikan yang terdapat pada Kabupaten Asmat terlihat pada Tabel 7, berikut.

Tabel 7 Data Satuan Pendidikan Tahun 2024

Bentuk Sekolah	Tahun 2024			Tahun 2025			Penambahan Satuan Pendidikan		
	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
SD	137	109	28	139	109	30	2	0	2
SMP	22	18	4	24	19	5	2	1	1
SMA	4	2	2	5	3	2	1	1	0
SMK	1	1	0	1	1	0	0	0	0
TOTAL	164	130	34	169	132	37	5	2	3

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) BOSP Pada Kabupaten Asmat

Pelaksanaan realisasi BOSP kepada setiap satuan pendidikan di kabupaten Asmat mengikuti alur sesuai bagan yang terlihat pada Gambar 1 Berikut.



Gambar 1 Diagram Alir Proses BOSP pada Kabupaten Asmat

Adapun persyaratan pencairan BOSP, sebagai berikut :

- (1) Satuan Pendidikan dinyatakan aktif Kegiatan Belajar Mengajar dengan disertakan foto dokumentasi.
- (2) Sudah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap sebelumnya dengan dibuktikan BAP dari Bidang Akuntansi pada BPKAD.
- (3) Sudah mengumpulkan RKAS dengan menganggarkan :

- ☀ Chrombook
 - ☀ Starlink
 - ☀ Kegiatan Ujian
 - ☀ Kegiatan Literasi dan Numerasi berdasarkan Raport Pendidikan
 - ☀ Menganggarkan Pakaian Seragam bagi siswa/i
 - ☀ Menganggarkan kegiatan Akreditasi bagi Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan Akreditasi
 - ☀ Menganggarkan Map Raport bagi siswa/i
- (4) Satuan pendidikan mengumpulkan SK kepala sekolah dan SK Bendahara BOS
 - (5) Foto Baliho RKAS di sekolah bersama para guru
 - (6) Satuan Pendidikan Mengumpulkan Profile Sekolah
 - (7) Satuan Pendidikan telah mengupload Nilai Ujian Tahun Pelajaran sebelumnya.
 - (8) Satuan Pendidikan telah mengambil Ijazah Peserta Ujian Tahun sebelumnya.

e. Kendala-kendala dalam pengelolaan BOSP

Penyerapan BOSP pada Kabupaten Asmat, belum terserap secara maksimal hal tersebut terlihat pada Tabel 6 masih terdapat saldo sebesar Rp. 1.081.443.120. Penyebab dari tidak terserapnya BOSP 100% dikarenakan masih terdapat kendala-kendala sebagai berikut :

- (1) Satuan Pendidikan tidak mencairkan Dana BOS pada waktu bersamaan di karenakan jarak hingga membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada Satuan Pendidikan tersebut menjadi terlambat.
- (2) BBM pada daerah – daerah tertentu tidak selalu ada.
- (3) Cuaca atau keadaan laut/alam yang tidak menentu.
- (4) Satuan Pendidikan tidak memiliki Operator yang tetap atau berubah-ubah.
- (5) Masuk di rekening sekolah tidak bersamaan.
- (6) Satuan Pendidikan tidak semua responsif membuat laporan pertanggungjawaban.
- (7) Komunikasi antara tim Bos Kabupaten dan Kepala Sekolah atau operator

tidal selalu lancar di karenakan jaringan.

Tanggapan hasil revidu dan Evaluasi oleh Anggota Pokja Papua Cerdas BPP-PPS terhadap dokumen Pengelolaan BOSP, dari Bidang PAUD dan PNF

Berdasarkan dokumen yang disampaikan dalam rincian realisasi BOSP di atas sesuai dokumen [4] diperoleh hasil, sebagai berikut :

- (1) Belum ada dokumen Program Kerja Tahun 2024 yang disampaikan
- (2) Dokumen yang disampaikan masih secara garis besar, tidak ada gambaran secara spesifik satuan pendidikan penerima BOSP, terutama untuk satuan pendidikan yang mendidikan mayoritas OAP.
- (3) Belum ada penjelasan tingkat pencapaian dan keberhasilan program berdasarkan akumulasi program kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perlu dijelaskan dalam bentuk grafik pencapaian.
- (4) Belum ada penjelasan tentang dampak dari program kegiatan dan anggaran yang ditimbulkan terhadap kemajuan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asmat.
- (5) Belum ada penjelasan tentang rencana tindaklanjut permasalahan sebagai dasar penyusunan program tahun 2025, terkait dengan keberlanjutan pengelolaan BOSP.

C. DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN ASMAT

1. Perjalanan Ke Kabupaten Asmat



Gambar 2 Perjalanan Menuju Ke Kabupaten Asmat

2. Pertemuan Bersama Asisten 3, Pimpinan OPD dan MRP



Gambar 3 Audensi Bersama, MRP dan Pemerintah Kab. Pada Aula Bapeda

3. Pertemuan Bersama Pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat



Gambar 4 Audensi Bersama Dinas Pendidikan Kab. Asmat

4. Kunjungan Ke Sekolah dengan siswa Moyoritas OAP di Kab. Asmat



Gambar 5 Akses Jalan menuju SD Persiapan Negeri Mbait Kab. Asmat



Gambar 6 Akses Jalan dan Perumahan Guru SD PN Mbait



Gambar 7 Rombongan BPP-PPS dan Dinas Pendidikan tiba di SD Persiapan Negeri (PN)
Mbait



Gambar 8 Perkenalan dan interaksi bersama siswa SD PN Mbait



Gambar 9 Diskusi bersama Para Guru dan Tendik SD PN Mbait



Gambar 10 Perjalanan Menuju SMP N Mbait



Gambar 11 Anggota BPP Memasuki Area SMP N Mbait



Gambar 12 Tatap muka bersama Para Guru dan Siswa SMP N Mbait



Gambar 13 Foto bersama Siswa, Guru dan Tendik SMP N Mbait



Gambar 14 Kunjungan pada PAUD Cahaya Kasih Bunda Kab. Asmat



Gambar 15 Kunjungan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kab. Asmat



Gambar 16 Ruang belajar dan Ruang Praktek SKB Kab. Asmat



Gambar 17 MCK dan Ruang ganti siswa SKB Kab. Asmat

5. Dokumentasi Kegiatan Reviu dan Evaluasi Realisasi Program Dinas Pendidikan Menengah



Gambar 18 Sesi-1 Pertemuan Reviu dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan Kab. Asmat
Pada Aula Hotel Asmat Permai



Gambar 19 Sesi-2 Pertemuan Reviu dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan Kab. Asmat
Pada Aula Hotel Asmat Permai

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kunjungan kerja pada Kabupaten Asmat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Lakukan SHEK secara berkesinambungan bersama OPD Dinas Pendidikan dengan periode Waktu Triwulan – Lengkapi instrumen monitoring.
- 2) Lakukan SHEK untuk melakukan *check and balance* terkait pelaksanaan program yang dilengkapi dengan Instrumen monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan program secara riil.
- 3) Perlu adanya regulasi daerah dan Inovasi baru dalam pencapaian hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asmat yang maksimal dengan anggaran yang tersedia
- 4) Laporan Unicef perlu diperoleh untuk menjadi tolak ukur pembanding dalam rencana program selanjutnya
- 5) Perlu koordinasi dan konsolidasi berkelanjutan antara Bapeda Kabupaten Asmat dan BPP-PPS : Akses dokumen Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) OPD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Kinerja

- 6) Cek prosedurnya sesuai regulasi Otsus – Minta Jadwal Penyusunan Regulasi Pemerintah daerah secara rutin setiap tahun, agar menjadi perhatian
- 7) Terkait dengan efisiensi akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat – BPP perlu lakukan koordinasi dengan K/L untuk mempertimbangkan efisiensi anggaran baiknya tidak berlaku pada tahapan waktu percepatan Otonomi Khusus
- 8) Komunikasikan dengan Pemda Asmat untuk dapat didiskusikan langsung dengan Pemprov PS dan K/L terkait, agar diberikan rekomendasi untuk bangunan di tempatkan di area hutan lindung : Percepatan penerbitan RT RW Provinsi Papua Selatan
- 9) Perlu adanya program kegiatan pendidikan keterampilan penggunaan komputer bagi SDM OAP, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau instansi terkait – Masukkan dalam program pendidikan khusus yang tertuang pada PP No. 106 Tahun 2021. Konsultasikan dengan Pemprov dan Pemda, serta K/L
- 10) Identifikasi keterbatasan anggaran dalam percepatan pembangunan dari Provinsi dan Kabupaten, selanjutnya menentukan prioritas dan ajukan ke K/L untuk memperoleh arahan dan petunjuk penambahan anggaran
- 11) Dibutuhkan Satgas penanganan kesehatan ibu hamil dan anak untuk melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung dan pemberian asupan gizi dan edukasi kesehatan ibu hamil sampai proses melahirkan sesuai dengan SOP agar semua kelengkapan anak terpenuhi sesuai administrasi kependudukan, selain itu perlu adanya edukasi terkait dampak pernikahan dini terhadap kesehatan keluarga
- 12) Koordinasi dan konsultasikan terkait lulusan SD yang tidak melanjutkan studi ke jenjang SMP, karena SMP tidak tersedia di kampung-kampung tersebut. Solusi penyediaan asrama di kampung yang tersedia SMP dan SMA
- 13) Perlu adanya pendataan secara spesifik untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan terkait formasi penerimaan guru ASN; dan selain itu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membantu melalui PPL mahasiswa semester akhir; atau program lainnya yang relevan untuk mengatasi kekurangan guru.

Demikian laporan kunjungan kerja pada Pemerintahan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat dalam Rangka Shek (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Dan Koordinasi) Pelaksanaan Tugas Badan Pengarah Papua (BPP) dan kelompok kerja (POKJA) BPP-PPS, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA SELATAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Pengarah Papua (BPP) selanjutnya disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) , berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat kordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan yang ada di Papua, yang memiliki tugas melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Kordinasi (SHEK) pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. BP3OKP ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana Otsus dan dana lainnya yang di berikan ke Papua digunakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi pembangunan Papua Sehat, Papus Cerdas dan Papua Produktif.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua menjadi lebih terarah dan jelas karena telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua tahun 2021-2041 yang membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. RIPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua Selatan yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga Orang Asli Papua (OAP) dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini di harapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dan. dapat tercapai Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Kesehatan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua . Program ini memilki tujuan yaitu menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar dan menjamin cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan membangun infrastruktur serta meningkatkan konektivitas untuk mendukung layanan kesehatan.

2. Tujuan Kegiatan

Konsultasi dan koordinasi Laporan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan dan Sosialisasi RIPPP

3. Ruang Lingkup

Program kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan tahun 2024 dan Sinkronisasi RIPPP pada Perencanaan kegiatan tahun 2025

B. Hasil yang dicapai

- Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMD
- Laporan data sesuai kebutuhan RIPPP
- Perlu dibuatkan format laporan
- Penurunan status akreditasi di RS Bouven Digoel dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pemenuhan persyaratan akreditasi
- Program Animha untuk pemenuhan tenaga Kesehatan di Papua Selatan, yaitu perekrutan tenaga Kesehatan untuk ditempatkan di fasyankes yang membutuhkan
- RSUD Merauke sudah ditingkatkan menjadi tipe B
- Kewenangan Provinsi dan Kabupaten terhadap program dan pelayanan Kesehatan
- Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Provinsi Papua Selatan memiliki 2 urusan namun didalam anggaran hanya memiliki 1 urusan, mohon BP3OKP membantu untuk berkoordinasi dengan Baperinda terkait hal ini

C. Rencana Tindak Lanjut

- Pokja Papua Sehat memberikan format laporan kegiatan yang disesuaikan dengan RIPPP
- BP3OKPP berkoordinasi dengan Baperinda terkait Dinas Kesehatan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki 2 urusan namun hanya memiliki 1 mata anggaran

D. Kesimpulan

Telah dilaksanakan konsultasi dan koordinasi Pokja Papua Sehat dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEGIATAN DI ASMAT

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Badan Pengarah Papua (BPP) selanjutnya disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) , berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat kordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan yang ada di Papua, yang memiliki tugas melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Kordinasi (SHEK) pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. BP3OKP ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana Otsus dan dana lainnya yang di berikan ke Papua digunakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi pembangunan Papua Sehat, Papus Cerdas dan Papua Produktif.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua menjadi lebih terarah dan jelas karena telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua tahun 2021-2041 yang membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. RIPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua Selatan yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga Orang Asli Papua (OAP) dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini di harapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dan. dapat tercapai Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Kesehatan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua . Program ini memilki tujuan yaitu menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar dan menjamin cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan membangun infrastruktur serta meningkatkan konektivitas untuk mendukung layanan kesehatan

2. Tujuan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan penggunaan dan penyerapan dana otonomi khusus tahun 2024, Sosialisasi RIPP, Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 agar selaras dengan RIPP. Peninjauan fasilitas kesehatan masyarakat

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan penggunaan dan penyerapan dana otonomi khusus kabupaten Asmat tahun 2024, Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Asmat tahun 2025, Fasilitas kesehatan di kabupaten Asmat

B. Hasil yang dicapai

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Asisten 3:

- Program kerja di kabupaten Asmat harus lebih di fokuskan kepada masyarakat dan terus dampingi masyarakat dalam pelaksanaan yang ada, misalnya ada kegiatan pelatihan yang di jalankan, setelah kegiatan selesai harus dampingi masyarakat dalam pengawasan, pemantauan dan pendampingan
- Hasil kertas kerja yang ada di laporkan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga apabila ada kendala bisa di selesaikan secara bersama
- IPM di Asmat masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Mappi, Boven Digoel dan Merauke
- Anak yang putus sekolah tinggi karena orangtua tidak perhatikan
- Cakupan Imunisasi rendah, harus ada kerjasama kepala kampung, kepala distrik dan bidang terkait, perhatikan taksiran tanggal partus, imunisasi HB0, BCG, DPT
- Harus ada inovasi dalam melaksanakan sumber dana yang ada seperti DAU dan DAK sehingga program dan kegiatan betul bertul mengena dan mereka mulai sadar bahwa kesehatan dan pendidikan itu sangat sangat penting
- Anak yang tidak menerima imunisasi BCG dengan baik akan mengidap penyakit TBC, hal hal seperti ini yang tidak dimengerti oleh masyarakat, padahal ini adalah hal hal dasar yang setiap tahun dilakukan

- Untuk tahun 2025 mari kepala kepala OPD kita serius laksanakan kegiatan dengan dana yang sudah besar diberikan sehingga tidak terjadi pengurangan dana, hasil cakupan program yang dilaksanakan naik
- Meskipun ada pengurangan dana mari tetap melaksanakan kegiatan dengan baik
- Laporan keuangan pemda asmat sudah bagus tapi pencapaian hasil masih sangat sangat kurang
- Hasil presentasi dengan UNICEF hasil cakupan imunisasi sangat rendah, hal ini biarlah menjadi tolak ukur kita kedepan untuk adanya inovasi
- Semua yang disampaikan ini semua untuk masyarakat Asmat terutama OAP supaya mereka hidup sejahtera, gembira dan sukacita menikmati dana otsus ini
- Pelayanan posyandu di kampung sering kosong karena penduduk pergi ke hutan, hal seperti ini harus di ingatkan kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan kampung jika ada kegiatan, anak sekolah juga tidak ada , sehingga perlu ingatan orang tua untuk tidak membawa anak anak nya ke hutan. Kepala kampung dan kepala distrik harus aktif ingatkan masyarakat
- Dana otsus harus dipakai oleh Orang asli asmat tidak boleh untuk orang lain
- Kabupaten Asmat akan kerjasama dengan 3 Perguruan Tinggi, dan akan melaksanakan evaluasi terhadap anak anak yang sudah SMP tidak bisa baca, apakah karena gurunya tdk ada di tempat , teknik mengajar gurunya yang kurang baik, atau karena kemampuan anak anaknya yang kurang

2) Kepala Bapeda

- Pelaksanaan dana otsus di kabupaten Asmat sudah berjalan 4 tahun sejak ada DOB
- Pemda Asmat berbangga atas perhatian dari BP3OKP dimana bapak Ketua langsung turun ke asmat sehingga di harapkan ada arahan untuk kebijakan pembangunan di kabupaten Asmat, dengan adanya bupati baru bisa disinergikan antara tugas BP3OKP, MRP dan pemerintah daerah kabupaten Asmat
- UU Otsus sudah ada jilid 1 dan jilid 2 dengan turunannya Perpres 106 dan 107 tahun 2021 terkait pelaksanaan dan RPP dan PMK 33 tahun 2024

- Baru **baru** ini Terdapat pengurangan dana APBN yang berimbas pada dana otsus baik untuk Aceh maupun Papua, dimana berdasarkan amanat undang undang perpres 106 dan 107 dana otsus itu mengacu pada dana APBN, dengan demikian untuk kabupaten Asmat awalnya dana otsus 260 M lebih berkurang sekitar 8 M lebih sehingga harus menyesuaikan lagi dengan APBD yang sudah dibagi
- Gambaran singkat bahwa kabupaten Asmat setelah DOB sejak tahun 2022 -2025 sebelum pengurangan kita mendapatkan dana otsus baik block grant maupun spesifik grant sudah 901.890.236.000 setelah dikurangi 8 M sehingga total yang akan diterima di tahun 2025 yaitu 893.599.360. sehingga kami pemangku dana otsus di kabupaten Asmat atas arah dan kebijakan UU Otsus No 2 tahun 2021 , PP 106 tahun 2021 tentang kewenangan otsus provinsi dan kabupaten, serta PP 107 tahun 2021 tentang pengawasan dalam rangka penggunaan dana otsus sesuai dengan visi dan misi amanat percepatan pembangunan papua di yaitu terwujudnya papua mandiri, adil dan sejahtera, dimana pemberian pelayanan kesejahteraan berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat menuju papua sehat , memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, berkarakter dan mampu bekerjasama menuju papua cerdas, meningkatkan potensi dan kreatifitas dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal, untuk papua sehat

Sasarannya tercapainya kehidupan yang sehat pada seluruh masyarakat.

- Gambaran dana otsus yang masuk kabupaten Asmat tahun 2024 baik blok grant, spesifik grant dan DTI jumlah totalnya 272.301.999.000, untuk dana otsus efisiensi tahun 2025 dari 260 M turun menjadi 252 M
- Kegiatan dari dana otsus yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu 19 OPD Pemangku dana otsus yaitu :
 - a. Bidang pendidikan : dinas pendidikan, bagian kesra, sekretariat daerah termasuk pemuda dan olahraga,
 - b. Bidang kesehatan : dinas kesehatan dan RSUD,
 - c. Ekonomi kerakyatan : Dinas tanaman Pangan, dinas perindustrian/perindakop, dinas kelautan dan perikanan

- d. Bidang Fisik dan Prasarana : dinas PUPR, dinas perumahan Rakyat, dinas Lingkungan Hidup
 - e. Bidang Afirmasi : Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan sipil dan bidang perencanaan dan penganggaran dan Inspektorat
- Berdasarkan amanat PP 106 dan PMK 33 besaran anggaran untuk tahun berikutnya mengacu pada besaran anggaran tahun sebelumnya dan harus sesuai dengan Papua sehat, Papua cerdas dan papua produktif sehingga berdasarkan arahan pak bupati pada **musrembang** RKPD dan Musrembang Otsus untuk tahun 2026 harus sesuai dengan RIPP
 - Kabupaten asmat mendapatkan beberapa penghargaan dari DJPK terkait laporan paling pertama dan Pencairan no 2
 - Dana otsus sesuai PMK 33 harus diserahkan kepada BP3OKP sebelum 31 maret, laporan tahunan akan di upload ke SIKD, nanti akan dibuat juga 1 untuk di masukkan ke BP3OKP
 - Saat ini sedang di susun RPJMD 2025-2029, dimulai dengan pembentukan team, orientasi, konsultasi publik, menyampaikan ke DPRD untuk meminta persetujuan selanjutnya akan dievaluasi di provinsi dan disetujui lagi oleh DPRD dan di evaluasi lalu di buar perda
 - Musrembang RKPD dan Otsus sudah dilaksanakan di tanggal 12-13 maret
 - IPM Kabupaten Asmat target 2021-2025, capaian sampai tahun 2024 karena tahun 2025 masih berproses, berdasarkan asmat dalam angka 57,63 %
 - Presentasi penduduk miskin target 21,84% sudah bisa diturunkan sampai 24,50 %
 - Pertumbuhan laju ekonomi target 2025 melambat dari target 6%, tahun 2024 3,47% karena ada beberapa pengurangan anggaran dari DAK dll
 - DAK tahun 2025 sudah hilang sekitar 30M, PUPR DAU sudah hilang 26M
 - Tingkat pengangguran terbuka target 0,84%, tahun 2024 2,05%

- Laju pertumbuhan penduduk target 2025 1,70%, tahun 2024 5,25%, artinya laju pertumbuhan penduduk melebihi. Jumlah OAP 101.561.000 data dukcapil
- Perbandingan IPM di tahun 2024 Asmat dan Papua selatan, asmat masih rendah yaitu 57,63 (naik 3% dari target di 2025) dan papua Selatan 68,86, nasional 75,62
- Angka Harapan Hidup tahun 2024 68,05 tahun, PPS 68, 46 tahun, nasional 74,15 tahun
- Harapan Lama Sekolah tahun 2024 9,71 tahun , PPS 12,67 tahun, Nasional 13,21 tahun
- Rata rata lama sekolah tahun 2024 5,82 tahun, PPS 8,38 tahun, Nasional 8,85 tahun
- Pengeluaran perkapita penduduk tahun 2024 6.262.000, PPS 9.759.000, nasional 12.341.000
- Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar masih di tahun 2022 yaitu SD 98,10 , SMP 62,33, SMA 66,18
- Saran dan prasarana sesuai dengan asmat dalam angka di tahun 2025 proyeksi tahun 2024 :
 - TK 62 gedung, murid 2.685, guru 353
 - SD/ sederajat : gedung 140, murid 23.230, guru 839
 - SMP/ sederajat : gedung 24, murid 4269, guru 352
 - SMA/ sederajat : gedung 6, murid 1.934, guru 142
 - Fasyankes : RSUD 1, Puskesmas 26, Pustu 58
 - Tenaga kesehatan : RSUD tenaga medis dokter spesialis dan dokter umum 23, Perawat/ bidan dll 367, farmasi 20, Puskesmas dan pustu tenaga medis 43, perawat bidan dll 649, farmasi 44
- Gambaran penduduk miskin :
 - Tahun 2021, Jumlah penduduk 111.632, Jumlah penduduk miskin 25.000, presentasi penduduk miskin 24,83%

- Tahun 2023, Jumlah penduduk 116.200, jumlah penduduk miskin 25.580, presentasi penduduk miskinnya 24,36% (menurun 0.47%)
- Tahun 2024, Jumlah penduduk 120.902, Jumlah penduduk miskin 26.000 presentasi penduduk miskin 24,50% (naik 0.16%)
- Gambaran luas kawasan hutan di kabupaten asmat, Luas Hutan Lindung di kabupaten Asmat total 2.501.457.81 ha ,dan luas area kawasan hutan sudah di pinggiran kota, Inpres 5 tahun 2025 terkait penerbitan kawasan hutan, menjadi awasan bagi kabupaten Asmat untuk membangun kawasan pemukiman di atas kawasan hutan lindung, Kantor bupati saat ini masih diatas kawasan hutan lindung, hal ini akan membahayakan bagi pejabat yang berwenang jangan sampai pembangunan akan berdampak hukum, sedangkan harus membangun tapi di satu sisi membangun di atas kawasan hutan lindung akan melanggar regulasi , sehingga ada 2 pembangunan kantor senilai 18 M harus di pending dulu sampai RTRW provinsi sudah jadi. Sudah di koordinasi dengan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk memperluas wilayah yang bisa dilaksanakan pembangunan, tapi masih belum ada kejelasan, mohon bantuan memberikan solusi bagi pemda asmat untuk memp ercepat RTRW provinsi papua selatan
- Usulan terkait renovasi asrama mahasiswa kewenangannya ada di provinsi
- Hasil dari kegiatan hari ini akan dituangkan kedalam RPJMD dan RKPD tahun 2026

3) Ketua MRP yang diwakilkan oleh ketua dewan kehormatan :

Yang hadir Dewan kehormatan,Pokja Perempuan, Pokja Adat, Pokja Agama:

- Tujuan MRP hadir untuk mengikuti musrembang tapi musrembang sudah dilaksanakan namun syukur karena masih ada kesempatan yaitu mengikuti pertemuan hari ini
- MRP hadir dalam rangka melakukan tugas fungsi dan kewenangan sebagai MRP yaitu mendeteksi, mengawal, memperjuangkan hak hak OAP dibidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan
- Dalam hasil musrembang harus memuat hak hak dasar dari OAP

- Harapan MRP dari 19 OPD pemangku dana otsus untuk mari kita bahu membahu, kerjasama, saling terbuka satu sama lain untuk meningkatkan apa yang diharapkan dan di butuhkan oleh OAP
- Anggaran cukup tapi masih ada kesenjangan dimana mana, MRP yakin bpk ibu skpd punya kemampuan utk mngatasi hal itu
- Setelah kegiatan ini MRP bisa dapatkan data terkait musrembang untuk kepentingan pengawalan
- MRP berharap masyarakat tidak berteriak lapar dan mereka juga diberikan kesempatan untuk bekerja
- Terdapat keluhan dari masyarakat dari distrik yang di rujuk ke RS tapi tidak ada perhatian terkait makan minum keluarga pasien
- Pendidikan ada masalah di masyarakat terkait ijazah yang sudah berada di sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi tapi ijazah SD yang belum di dapat, tolong dari dinas pendidikan untuk meperhatikan hal ini
- Ada masyarakat yang mau demo terkait penerimaan CPNS adalah contoh dimana masyarakat kita yaitu OAP mengalami kesulitan
- Untuk tahun ini MRP akan datangi instansi untuk ajak kerjasama jika ada kesulitan yang dihadapi bisa dicari solusi bersama
- Terimakasih kepada pemda atas ruang yang diberikan untuk bisa berdiskusi dan berkoordinasi program kerja baik provinsi maupun kabupaten atas kepentingan otsus
- Masukkan untuk dinas pendidikan dan kesra terkait penggunaan dana otsus terkait tunggakan beasiswa yang masuk langsung ke rekening, sebaiknya masuk saja lewat rekening kampus sehingga tidak ada masalah. Jika ada yang berprestasi dan masuk kuliah jurusan kedokteran, pilot, IPDN jangan diwakilkan, harus OAP karena untuk itulah dana otsus hadir di kabupaten asmat, nama2 yang diusulkan untuk beasiswa di berikan juga kepada MRP untuk dikaji apakah benar anak anak OAP yang di usulkan atau tidak

- Jangan ada pejabat non OAP yang mewakili orang Asmat untuk beasiswa S3 dengan dana otsus, harus orang asmat jangan ada yang mewakili
- Untuk tahun kedepan jika diselenggarakan musrembang MRP dihadirkan 1-2 minggu sebelum kegiatan
- Program yang turun ke masyarakat harus betul betul menyentuh langsung ke masyarakat, contoh untuk dinas pemberdayaan perempuan untuk bagaimana memberdayakan mama mama papua, dibangun pelabuhan kecil ; pelabuhan ikan untuk mama mama, pondok wisata lokal, pembangunan balai pelatihan, pondok jualan
- Pelatihan khusus untuk perempuan papua, seperti cara berorganisasi, pelatihan komputer, karena pada saat tes CPNS banyak OAP yang tidak bisa komputer, dengan cara seperti ini adalah contoh program dari dana otsus ini bisa di rasakan langsung masyarakat
- Terdapat 2 anak dengan Gizi buruk dan buruk di Onggatmit, kompleks masyarakat asmat di merauke
- Program MPRP dari pokja perempuan adat, meminta bantuan Dinas pemberdayaan perempuan dalam pembentukan organisasi perempuan papua selatan dan juga organisasi perempuan dari masing masing kabupaten
- Harus ada Program beasiswa untuk anak asmat ke luar negeri , pada saat ini ada anak asmat yang disekolahkan ke luar negeri seperti dari daerah lain di papua
- Program 1000 hari kelahiran yang sudah di jalankan di kabupaten asmat yang saat ini berjalan hanya di kabupaten harus di jalankan juga di setiap kampung dan distrik
- Sebaiknya bangunan fisik di kurangi dan lebih di arahkan kegiatannya kepada program di pendidikan dan kesehatan
- Pelayanan di rumah sakit harus lebih di tingkatkan, angka kematian di turunkan
- Dinas PUPR mohon dibantu OAP yang memiliki CV untuk memberikan mereka pekerjaan proyek, karena banyak perumahan mereka tidak jelas, ekonomi mereka juga kurang, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik
- Pengembangan untuk produk utama sagu di kabupaten asmat

- Mohon diperhatikan keadaan fisik asrama asmat yang ada di merauke, jayapura, manado dan tempat yang lainnya

4) Anggota BPP :

- Harapan BP3OKP Bupati atau wakil bupati hadir pada pertemuan hari ini supaya apa yang kami sampaikan bisa menjadi tujuan bersama
- Seorang pemimpin harus ada ditengah tengah masyarakat untuk mendengarkan langsung hal hal dipenting untuk masyarakat
- Tujuan utama BP3OKP hadir ke kabupaten Asmat adalah BP3OKP ingin mendapatkan laporan penggunaan dana otonomi khusus sesuai dengan UU No 2 tahun 2021, Perpres 121, 106 dan 107 serta PMK 33 disitu dengan jelas dikatakan bahwa BP3OKP dan sebagai lembaga diberikan laporan keuangan dari penggunaan dana otonomi khusus
- Sesuai PMK 33 pengawasan tata kelola dana otonomi khusus yaitu :
 1. Kementrian Lembaga
 2. Pemerintah Daerah
 3. DPR
 4. DPD
 5. BPK
 6. PTN
 7. MRP

Tapi harus berkoordinasi dan diarahkan oleh BP3OKP oleh sebab itu BP3OKP dengan hormat meminta laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 termasuk realisasi anggaran, penggunaan spesifik untuk apa, BP3OKP akan cek langsung ke kampung kampung untuk memastikan kebenaran penggunaan anggaran baik pendidikan maupun kesehatan

- BP3OKP Tidak ingin masyarakat menjadi korban

- BP3OKP memiliki kekuatan karena Jabatan Kepala BP3OKP setara dengan menteri karena BP3OKP melapor langsung kepada Presiden dan wakil presiden sehingga bisa berbangga untuk itu ibarat celana robek mari diperbaiki bersama secepatnya
- BP3OKP hadir untuk meminta laporan pertanggung jawaban keuangan karena ini perintah perpres dan pmk 33 sehingga kami meminta kerjasamanya, BO3OKP juga melakukan hal yang sama di kabupaten yang lain, diharapkan Papua Selatan berkembang menjadi lebih baik, menjadi seperti kota metropolitan
- Setelah berdiskusi dengan bpk Ketua DPR ternyata banyak sekolah yang anak-anaknya belum bisa baca tulis
- MRP harus memiliki data OAP sesuai dengan pokja masing-masing, untuk pokja Agama berapa jumlah agama yang ada, marga-marga yang ada di Papua Selatan, data base harus dibenahi sehingga ketika kita berbicara di pusat sudah memiliki data terkait penggunaan dana otsus ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat,
- Mulai tahun 2025 kedepan harus berbenah, perbaiki sistem terkait data data OAP, baik pendidikan dan lainnya sehingga dengan data yang akurat kita presentasikan dikementrian dalam negeri supaya efisiensi ini bisa dipertimbangkan, begitu ada efisiensi di cek kondisi yang ada seperti keadaan fasilitas dan pelayanan untuk OAP di puskesmas, pelayanan pendidikan untuk OAP
- Target stunting di tahun 2041 harus 0, tapi harus didukung dengan data yang akurat
- BP3OKP bisa memfasilitasi koordinasi antara daerah dan pusat, menyampaikan segala permasalahan di daerah ke pusat, ketika terjadi sesuatu di daerah pusat langsung hubungi BP3OKP untuk cek permasalahan yang ada
- Tanggal 12 BP3OKP menyuratkan kepada kementerian dalam negeri dan ditindak lanjut oleh wakil menteri, kemudian BP3OKP mengundang ketua DPR Provinsi Papua Selatan bersama wakil ketua I dan ketua II, untuk berdiskusi dengan ibu wakil menteri
- Sangat dibutuhkan kerjasama jika ada masalah, bisa didiskusikan bersama, itulah hadirnya BP3OKP

- Diharapkan untuk tahun ini tidak adanya silpa. karena itu menggambarkan kinerja dari kepala OPD, bpk asisten 3 harus perhatikan kinerja kepala OPD
- Pemerintah pusat berharap penyerapan anggaran harus 95 % oleh karena itu perencanaan harus baik, dengan mempertimbangkan hasil musrembang program kegiatan prioritas yang ada disesuaikan dengan anggaran yang diberikan
- Bupati dan DPR wajib evaluasi kinerja dari OPD minimal setiap 6 bulan dengan tujuan bisa melihat berapa persen penyerapan anggaran .Triwulan I hampir selesai bagaimana laporan apakah sudah selesai atau tidak, karena BP3OKP bisa memberi masukan kepada kementerian keuangan untuk menahan dana transfer jika belum memenuhi syarat salur
- Evaluasi, koordinasi, komunikasi sangat penting
- Triwulan I anggaran sudah harus diserap 25% , II harus 50% dan III harus 75%, itulah pentingnya perencanaan yang baik
- Sesuai dengan diskusi saya dengan bpk Gubernur diharapkan kepala OPD yang ditempatkan di OPD sesuai dengan backgroundnya sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik karena kompetensi berkaitan dengan integritas dan kapabilitas
- Papua Selatan mau di bawah kemana semua tergantung dari hati nurani kita masing masing, kepala OPD harus turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang kita tabur akan kita tuai, dalam firman Tuhan sudah sangat jelas
- Sangat diharapkan kepada pak asisten 3 yang mewakili pak bupati, pak kepala bappeda untuk memasukkan laporan realisasi anggaran tahun 2024 paling lambat tanggal 31 maret
- Untuk tahun ini dan selanjutnya BP3OKP akan kejar realisasi penggunaan anggaran dan ketika ada temuan BP3OKP bisa memerintahkan Kejaksaan tinggi dan KPK untuk melakukan pemeriksaan tetapi tidak juga seekstrim itu, kami sebagai anak daerah sebagai pemimpin memberikan juga arahan, bimbingan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi itulah fungsi BP3OKP sehingga sesuai Perpres 106 dan PMK 33 laporan harus diserahkan kepada BP3OKP paling lambat 31 maret. Jika terdapat temuan

BP3OKP akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memanggil OPD tersebut. BP3OKP indenpenden, tidak nada muatan apapun

- Buatlah perencanaan yang baik dan matang sesuai dengan kemampuan kita, ibarat anak tangga jika hanya mampu naik 3 tangga jangan paksa untuk naik 5 atau 10 tangga
- Kepala OPD harus paham atas program dan kegiatan termasuk lokasi yang akan di bangun untuk pekerjaan fisik
- MRP, DPR, Bupati, wakil bupati dan kepala OPD mari bersama sama kita bergandeng tangan, berkolaborasi, bersinergi dengan aturan sudah ada dari RIPPSP sesuai tupoksi baik bidang Pendidikan, kesehatan, produktif dan polhukam.
- Kita semua yang ada di papua selatan bersatu baik anak asli, suku jawa, dan suku lainnya, ibarat sapu yang utuh sulit di patahkan tapi yang satu satu mudah dipatahkan. Orang orang cerdas, pintar, yang punya hati untuk papua selatan mari bersatu membangun papua selatan
- Di kementerian Perumahan PPS akan dapat rumah 1000 unit dan dari kementerian Transmigrasi 500 unit, sudah didiskusikan dengan pak gubernur bawa toko toko agama akan dapat rumah baik Ialam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.
- Dengan kapasitas sebagai anggota BPP memiliki kesempatan untuk melobi di kementerian termasuk kementerian kesehatan, sudah di dorong universitas Musamus untuk membuka Fakultas kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dengan harapan anak anak kita bisa kuliah di PPS
- Bidang Pendidikan, data base pendidikan anak anak asmat harus diperhatikan karena ini hal yang sangat penting, baik SD,SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi sehingga penggunaan dana otsus ini menjadi tepat sasaran bukan hanya wacana
- Bidang kesehatan, data base jumlah tenaga kesehatan dokter spesialis, umum, bidan dan nakes lainnya, informasi bpk Bupati Asmat ada kerjasama dengan Unhas untuk pendidkan tenaga kesehatan hal ini sangat bagus.
- Bagi anak anak penerima beasiswa harus dibuat pakta integritas yang di tanda tangan oleh orangtua, anak dan penyelenggara beasiswa, sehingga mereka mnnggunakan beasiswa sesuai dengan seharusnya bukan dipakai untuk mabuk mabuk atau yg lainnya

yg tidak benar, hal ini juga sudah di bicarakan dengan pak gubernur agar anak anak kita dipersiapkan kualitas moralnya sehingga anak anak yang kuliah di luar negeri pun bisa siap kerja sambil kuliah,

- MRP pokja pendidikan harus melakukan fungsi kontrol yang baik kepada anak anak penerima beasiswa
- Didalam pendidikan bagi anak anak papua yang harus kita siapkan adalah 3 pilar utama yaitu Iman, akhlak budi pekerti dan ilmu
- Sesuai permendikbud no 44 tahun 2024 sudah disetujui oleh 5 kementerian (kemendikbud, kemenag, PAN RB, Kemendagri, Polhukam), dengan demikian papua bisa dibantu dengan pendidikan berpola asrama
- Diharapkan kepada MRP untuk bersama sama kita upayakan adanya museum papua selatan, didalam museum menjadi representasi marga dan adat yang ada di papua selatan dan hal ini sudah saya bicarakan dengan bpk gubernur, sehingga orang papua bisa dikenal identitasnya dari turunannya, karena moyangnya, jangan kita kehilangan identitasnya. Diharapkan bantuan dari MRP sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan pokja yang ada (pokja agama, pendidikan, sehat) untuk sama sama berkolaborasi dan benahi apa apa yang kurang
- Jika ada permasalahan di daerah mohon disampaikan kepada kami BP3OKP, dengan senang hati kami akan membantu mengakomodir
- Terkait efisiensi dana otonomi khusus untuk papua dipotong 500 M sesuai inpres no 1 tahun 2025, ini tugas kita bersama untuk berjuang di pusat, 6 gubernur DOB, 6 anggota BPP, MRP dan DPR untuk bertemu pak presiden langsung, kalau kita berjuang bersama semoga bisa di evaluasi lagi terkait efisiensi ini
- Sekali lagi pak asisten 3 mohon laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024 segera brtikan kepada BP3OKP karena ini adalah perintah perpres bukan keinginan kami BP3OKP, hal yang sama juga kami sudah minta dari kabupaten lain dan provinsi, kami selalu terbuka untuk semua dan kritik masukan
- Ada hal yang harus diperhatikan terkait permasalahan dana otsus yaitu perda, dengan adanya perda akan mengikat pendistribusian anggaran lebih mudah, misalnya asrama

yang dikelola oleh yayasan baik katolik maupun pesantren bisa terakomodir dengan baik

- Terkait masalah kependudukan, hal ini sudah pernah di bahas dengan MRP, dandiharapkan MRP bisa mengawasi hal ini, dimana penduduk pendatang jangan serta merta diberikan KTP, minimal sudah tinggal 6 bln-1 tahun baru diberikan KTP, saudara OAP juga harus semua memiliki KTP sehingga dalam pelayanan BPJS juga akan lebih mudah
- Program yang dijalankan lebih di spesifik sehingga perlakuan kepada masyarakat OAP lebih dipermudah
- Mohon di kabupaten asmat ini dibuat data base pemetaan jumlah siswa siswi OAP, putra putri asmat yang disekolahkan melalui pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dengan dana otsus dan dibuat pakta integritas minimal 15 tahun untuk mengabdikan di asmat
- Sudah pernah dicarakan di kementrian kesehatan bersama papua sehat juga dengan gubernur untuk bagaimana datangkan dokter spesialis dari luar untuk pelayanan untuk masyarakat dengan dana otsus
- Dana otsus bisa digunakan untuk kegiatan fisik sesuai PMK 33 namun hanya bisa 5%
- Untuk OAP yang punya CV sebaiknya di data sehingga pembagian proyek lebih mudah dan merata, namun harus dibenahi dan diberikan pembelajaran moral sehingga ketika mereka dapat proyek mereka tidak jual lagi, atau mereka bekerja dengan tanggung jawab
- Dana Otsus tidak bisa digunakan untuk :
 1. Gaji dan tunjangan ASN, honorer dan DPR yang dipilih oleh pemilu, kecuali jalur afirmasi
 2. Pengadaan dan peningkatan sarpras ASN kecuali untuk tenaga pendidik dan kesehatan
 3. Operasional atau belanja rutin perkantoran
 4. Penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran

5. Honorarium ASN

- Asmat memiliki sumber daya alam minyak dan gas. Untuk MRP Pokja Adat harus mapping wilayah adat, sehingga kita ketika sumber alam ini di eksploitasi sudah bisa di tentukan wilayah adatnya. Tenaga teknik permnyakan sudah tersedia atau SDM nya
- Siapkan SDM dengan baik sehingga orang asmat tidak hanya penonton
- Asmat memiliki kura kura moncong babi, harus di jaga kelestariannya, harga miliaran, perketat karantinanya
- Terdapat bantuan rumah dari pusat akan di atur sesuaikan asal adat

5) Ketua DPR :

- DPR harus dilibatkan dalam kegiatan perencanaan daerah
- Bidang Pendidikan : banyak anak anak yang masuk sekolah tidak ada akte, ibu yang setelah melahirkan ketika pulang tidak diberikan surat keterangan lahir, ketika mengurus kembali dipersulit sementara masyarakat kita akan menjadi malas lagi mengurus jika sudah di tolak atau dipersulit, hal sperti ini harus ada kerjasama di antara bidang kesehatan, pendidikan, cspil, perempuan dan anak, karena sangat banyak anak anak di asmat yang tidak sekolah karena tidak ada akte
- Melihat kesejahteraan tidak hanya dilihat grafik yang ada dalam kota, tapi dilihat juga di kampung

6) Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda :

- Mekanisme musrembang dilakukan di distrik kemudian ke kabupaten, dan pada saat ini sudah dilakukan musrembang RKPD dan musrembang otsus dalam bulan maret, yang di hadiri oleh pak bupati
- Sampai saat ini kabupaten asmat dan kabupaten lain termasuk provinsi belum ada penerimaan dana otsus. Hal hal yang menyebabkan dana otsus bisa diberikan harus memenuhi dokumen syarat salur seperti Laporan syarat salur, RAP, validasi RAP dan APBD, Laporan tahunan dan APBD
- Saat ini proses dana otsus berada pada tahap penyusunan prubahan RAP karena ada penyesuaian perubahan namun sudah di proses di sistem dan hari ini kami laporkan ke provinsi setelah keluar berita acara kemudian validasi antara RAP dan APBD

- Laporan tahunan tahun 2024 yang dilaporkan tahun 2025 dikelola Bappeda dan BPKD yang ditampung dari realisasi anggaran OPD, dan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa Laporan tahunan harus disampaikan juga kepada BP3OKP selain kepada gubernur
- Didalam mandatori disebutkan bahwa pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 20%, yang lainnya ekonomi, itu berarti pendidikan bisa lebih dari 30% dan kesehatan bisa lebih dari 20%, tapi ekonomi kerakyatan akan turun, namun Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur pagu anggaran terkait prioritas mana namun harus mengacu pada mandatori
- Mandatori kabupaten Asmat
 - Tahun 2022 : Pendidikan 31%, kesehatan 16%, ekonomi 33%
 - Tahun 2023 : Pendidikan 39%, kesehatan 21%, ekonomi 40%
 - Tahun 2024 : Pendidikan 46%, kesehatan 26%, ekonomi 28%
 - Tahun 2025 : Pendidikan 46%, Kesehatan 26%, ekonomi 28%
- Proporsi OTSUS terhadap APBD
- Tahun 2023 : 12%
- Tahun 2024 : 16%
- Tahun 2025 : 14%
- Penggunaan dana OTSUS untuk konstruksi jalan bisa dilihat pada atapnya yaitu seng. Demikian dengan pasien rujukan untuk tahun 2025 anggarannya sebesar 2.5 M terdiri dari makan minum pasien dan keluarga pasien minimal 1 orang, jika dana OTSUS belum keluar itu yang menyebabkan belum terakomodir makan minum pasien rujukan. Untuk Pelayanan ibu sebelum dan setelah melahirkan semua peralatannya ditanggung dana OTSUS, Balita dan Gizi masyarakat juga ditanggung dari dana OTSUS
- Untuk pengelolaan pendidikan beasiswa asrama sebaiknya kerjasama dengan yayasan
- Belanja pertanian untuk ekonomi kita sudah fokus melayani untuk stunting dengan lokusnya. Ada modal usaha untuk mama mama Papua. Salah satu yang menjadi keunggulan di Asmat adalah yang menjaring hanya bisa orang asli Asmat
- Menjadi catatan bahwa di Merauke sudah ada anak-anak yang konsumsi ganja, mohon menjadi perhatian kita bersama sehingga banyak terjadi kekerasan

- Setiap tahun kabupaten asmat ada alokasi dana 6 M untuk bantuan studi di kesra untuk kedokteran, tenaga kesehatan lainnya, Teknik perminyakan kerjasama dengan universitas Pertamina, Geologi dan Geofisika. Dengan sistem kontrak 1 M selama 4 tahun tidak perlu dibayar yg lain lagi

DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT

1) Anggota BPP :

- BP3OKP ingin mendapatkan gambaran Dan masukkan langsung untuk dapat kami sampaikan ke pusat terkait pelayanan kesehatan di kabupten Asmat, jumlah dokter spesialis, bagaimana kondisi pustu yang ada di kampung dan distrik
- Pemberian makanan tambahan harus difokuskan pafa masyarakt asli / OAP terutama yang ada pinggiran , supaya lebih tepat sasaran, karena kalau di tengah kota masyarakatnya sudah lebih kepada yang menengah ke atas
- Kami sudah diskusi dengan perwakilan kemenkes pada saat kegiatan di jayapura terkait kompensasi tenaga kesehatan di daerah terpencil sudah terakomodir, dan kami mau menerima laporn terkait tunjangan terpencil untuk nakes apakah sudah berjalan atau tidak
- Terkait beasiswa atau bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan anak asmat saya setuju jika di sekolahkan di wilayah Papua sehingga dana otsus itu bisa beredar di tanah papua sendiri
- Tekait pelayanan BPJS baik masyarakat yang di perbatasan antara papua selatan dan pegunungan juga akan kami bicarakan diantara anggota BP3OKP untuk bagaimana penanganan hal ini
- Terkait kepesertaan BPJS tahun lalu sudah kami dorong untuk Papua Selatan 139.000 peserta, update terahir dari 139.840 sudah di akomodir dari kementrian sosial 135.000, 4000 masih ada kendala karena administrasi setelah itu belum ada update lagi. Kita punya cela untuk bisa mendorong hal ini, Dalam waktu dekat akan kita undaang kepala BPJS Papua Selatan off line dengan para kepala dinas dan direktur RS di Provinsi Papua Selatan
- Diharapkan jangan ada dana silpa karena dengan besarnya dana silpa akan menjadi tolak ukur bagi kinerja kepala OPD. Kami sangat berharap penyerapan dana 95% ,

sehingga apabila penyerapan anggarannya kurang maka kepala daerahnya dianggap tidak bisa memanfaatkan dengan baik anggaran yang diberikan.

- Salah satu fungsi BP3OKP adalah memantau dana transfer, jika ada keterlambatan kami bisa crosscheck, namun yang sering terlambat adalah laporan dari pemda
- Kami sangat mengharapkan ada koordinasi yang baik agar dana yang diberikan tepat sasaran
- Apabila dana SILPA yang akan dikembalikan ke pusat BP3OKP memiliki kapasitas untuk meminta diskresi, contoh untuk tahun 2023 kami BP3OKP menyurat kepada presiden untuk meminta diskresi sehingga anggaran tersebut tidak dikembalikan ke kementerian tapi diberikan di tahun berikutnya
- Terkait rujukan untuk ASN OAP disesuaikan dengan kebijakan. Karena dalam Perpres 106 dan 107 penggunaan dana otsus untuk OAP tidak disebutkan mampu atau tidak mampu
- RIPP harus menjadi pedoman dalam penyusunan RAP
- Untuk beasiswa dokter spesialis dan dokter umum di LPDP, dokter Spesialis di support full, persyaratan administrasi dan tes potensi akademik. Klasifikasi umum dan OAP, OAP berdasarkan marga, persyaratan afirmasi (OAP non OAP) yang sudah tinggal di Papua minimal 10 tahun. Dengan pakta integritas, mereka harus MOU dengan orangtua dan pemda setempat, sehingga mereka harus mengabdikan 15 tahun dan hal ini akan kami usulkan di perdasus di DPRP
- Apa yang menjadi kendala kedepan baik bpk kepala dinas maupun ibu direktur bisa disampaikan ke kami karena laporan kami disampaikan ke wakil presiden kemudian dilanjutkan ke presiden
- Di Asmat bisa juga diusulkan untuk dibuka SPK nanti hal ini akan kami bicarakan dengan bpk Gubernur
- Usulan alat hemodialisa dari RS di usulkan kembali karena musrebang tahun 2024 tidak tampak, sehingga kami bisa kawal Untuk perumahan Papua Selatan akan dapat bantuan perumahan dari PUPR dan kementerian transmigrasi, hal ini harus didiskusikan dan data data untuk pembagian di 4 kabupaten

2) Kepala Dinas Kesehatan :

- Pada prinsipnya kami memiliki komitmen yang kuat untuk menggunakan semua anggaran yang ada dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik baik dari RS maupun puskesmas dan puskesmas
- Ada beberapa hal mendasar yang terjadi yaitu biaya transportasi yang besar, 200 M tidak ada apa adanya, memang dana nya besar namun karena lebih banyak anggaran terpakai untuk biaya BBM
- Karakter masyarakat di asmat membutuhkan kerja keras dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, kami sudah merencanakan dengan baik namun keberhasilan 95% ada di masyarakat, apakah mereka memanfaatkan dengan baik atau tidak , upaya kedepan adalah promosi kesehatan
- Kita berusaha memenuhi kebutuhan nakes sesuai standar, dimana 1 Puskesmas minimal 9 tenaga dasar dan untuk asmat baru bisa akomodir 58% dari rasio kebutuhan nakes, kemampuan fiskal tidak sampai dalam pembiayaan pemenuhan tenaga kesehatan, misalnya dengan dibangun puskesmas di semua tempat maka kebutuhan tenaga kesehatan untuk puskesmas 444 tenaga krn 2 orang untuk 1 puskesmas, sehingga saat ini hanya 300 tenaga yang ada di puskesmas, masih dibutuhkan 100 tenaga lagi tapi fiskal kita tidak mampu membiayai
- CKG : Cek Kesehatan Gratis, adalah program pemerintah yang anggarannya sebaiknya tidak digabung dengan anggaran rutin karena jika digabungkan maka akan menyita logistik dari kegiatan rutin dan apabila CKG ini menunggu masyarakat datang di puskesmas seperti ini sangat sulit karena pemahaman masyarakat kita yang masih minim, namun demikian kami tetap mendukung kegiatan ini
- Untuk pemenuhan tenaga dokter di puskesmas agak sulit karena mereka melihat keadaan asmat yang sulit, walaupun ada yang datang rata rata tidak lama bertahan namun secara umum pemerintah asmat sudah berusaha maksimal untuk pemenuhan tenaga dokter, Dengan adanya BP3OKP ada dukungan untuk RS dalam hal pemenuhan tenaga dokter
- Untuk kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dibutuhkan pendidikan untuk tenaga kesehatan, baik perawat, bidan, farmasi, analis dan tenaga lainnya sehingga pemenuhan 9 tenaga kesehatan dasar di puskesmas bisa terpenuhi

- Sudah ada Kerjasama Pendidikan bagi tenaga kesehatan antara pemerintah Asmat dengan Universitas Hasanudin program studi Prawat dan Prawat Gigi. Untuk prawat sudah meluluskan 100 an lebih dan prawat gigi baru akan lulus tahun ini.
- Tapi menurut saya jika ada anak anak kita yang akan disekolahkan sebaiknya disekolahkan di wilayah Papua saja sehingga bisa lebih mudah di awasi, dan ketika akan praktek dilapangan anak anak tidak canggung karena tempat praktek yang pasiennya adalah masyarakat papua sendiri
- Pengusulan beasiswa Sekolah untuk tenaga analis sudah pernah di usulkan 5 atau 6 tahun yang lalu tapi belum di respon oleh pimpinan daerah, dan kami berharap jika ada seleksi untuk beasiswa pendidikan tenaga kesehatan kami berharap kami yang lakukan seleksinya, karena kamilah yang tau kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga seleksinya lebih obyektif
- Kami berharap dana kesehatan minimal sama dengan dana pendidikan karena orang sehat dulu baru cerdas
- Efisiensi tidak boleh ditanah di papua, papua lebih sulit berkembang dengan adanya efisiensi, belum ada efisiensi saja sudah sulit apalagi dengan adanya efisiensi

3) Sekertaris Dinas Kesehatan :

- Tahun 2025 dinas kesehatan kabupaten Asmat mendapatkan 2 lokus untuk pembangunan puskesmas tapi karena ada perpindahan pengelolaan dari dirjen yankes ke kesmas sehingga lokus yang terbit justru di lokasi puskesmas yang sudah ada pembangunan puskesmas permanen, minta di pindahkan tapi belum disetujui.
- Diskusi bulan desember tahun 2024 kami melobi 2 distrik yang belum ada puskesmas untuk di akomodir untuk tahun 2026 memang ada perubahan prototipe tapi sampai sekarang belum ada progres.
- Jumlah pustu ada 66, ada 23 pustu yang rusak berat tapi permasalahan ada di pembiayaan, karena 1 unit untuk membutuhkan dana hampir 1 M. Anggaran dari pusat untuk tipe 143 hanya 800 jt an sedangkan perhitungan untuk di wilayah asmat hampir 2,4 M sehingga sampai saat ini belum bisa ketemu anggarannya dengan di pusat

- Alat kesehatan untuk 66 puskesmas ; partus set dan solar sel baru 18 yang terpenuhi sisanya belum terpenuhi. Kesulitan yang lain juga adalah karena kami sepenuhnya menggunakan air hujan sehingga daya tahan alat jadi berkurang seperti karet di tensi menjadi lapuk, untuk digital beli batreynya sulit
- Untuk makanan tambahan di wilayah asmat sebaiknya formulasinya jangan di kasi susu karena kalau di kasi susu semua keluarganya juga akan ikut konsumsi sebaiknya bersifat suplemen
- Usulan rumah sudah kami sampaikan ke PUPR, karena di setiap puskesmas dan puskesmas harus ada perumahan untuk nakes, yang menjadi kendala juga adalah satuan harga yang sangat berbeda jauh dengan standart harga dari kementerian kesehatan / pusat
- Dari provinsi ingin memberikan bantuan tenaga kesehatan tapi kami tolak karena tidak ada rumah termasuk nusantara sehat bahkan ada dokter kami yang tinggal di dalam puskesmas

4) Direktur RSUD :

- Di RSUD Perpetua Safanpo pasien OAP 70-80%, data terakhir di tahun 2024.
- Ketersediaan dokter, Dokter Umum 13 dan semua dokter umum di dorong untuk ambil spesialis, hanya kesulitannya dokter dokter ini harus mencari dana sendiri untuk sekolah spesialisnya, memang ada beasiswa dari kemenkes, LPDP hanya dokter dokter ini lebih berharap beasiswa dari pemda, namun pemda memiliki trauma dengan beasiswa pendidikan dokter spesialis dimana ketika sudah berjalan prosesnya dokternya merasa tidak cocok kemudian keluar. Jadi mungkin pemda berpikir pemda invest tapi kemudian kami tidak dapat tapi kami tidak dapat hasilnya, ada rasa ketidakpercayaan terhadap sebagian dokter sehingga kemudian menjadi imbas pada kita kita ini. Tapi ada banyak juga adik adik dokter yang kemudian mengambil pendidikan dokter spesialis dengan beasiswa kemenkes.
- Ketersediaan dokter spesialis di RS ada 9, SpB, SpA, SpPD, SpPK, SpRad, SpOG, SpAn dan termasuk saya dokter spesialis gigi mulut, secara keseluruhan sudah memenuhi 7 dasar spesialis di RS, tahun ini ASN SpP akan datang bergabung di RSUD.

- Kami berharap ada regenerasi sehingga posisi dokter spesialis ini bisa tetap terisi, jadi kita harus terus menjaga agar mereka tetap bertugas dan tidak pindah ketempat yang lain, untuk hal ini kami siasati dengan pola pemberian TPP atau insentif yang kami bijaki
- Fasilitas untuk dokter spesialis masih ditempatkan di mess, ada 3 dokter yang sudah ditempatkan di mess dimana fasilitasnya dibantu oleh pak gubernur dan pak bupati, Kami berharap ada fasilitas lagi karena masih ada dokter yang akan datang
- Universal Health Coverage (UHC), tidak ada pembiayaan kesehatan yang gratis hanya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis, dan pembiayaan ini bisa di cover oleh pihak ke 3 yaitu BPJS,
- Sudah 95% penduduk asmat sudah tercover dengan BPJS, tapi pasien yang ke RS masih ada yang tidak tercover oleh BPJS, itu karena belum tanda tangan nota kesepahaman UHC di kabupaten Asmat. Hal ini kan berdampak ke pasien yang akan dirujuk jika belum tercover oleh BPJS.
- Untuk UHC memang harus ada koordinasi dengan dinas dukcapil dan dinas sosial sehingga bisa berjalan dengan baik, untuk meminimalkan pasien pasien yang tidak tercover BPJS terutama pasien BPJS.
- Pasien Untuk pasien rujukan yang belum tercover BPJS ada bantuan dari provinsi untuk mengcover pasien pasien tersebut
- Dalam rujukan di jayapura sering ada tindakan tindakan yang masih dibiayai meskipun sudah tercover BPJS, contohnya pasien yang dirujuk di RS Dok 2 tapi butuh CT Scan di Provita itu berarti ada tindakan yang harus di bayar , begitu juga dengan tindakan yang lain termasuk obat juga hal ini sudah kami komplain ke BPJS tapi jawaban dari RS Dok 2 adalah mereka tidak tersedia dana untuk mengcover yang seharusnya tercover dari tindakan tersebut, karena akan berdampak kepada pasien jadi kami tetap membayar saja.
- Sumber dana Rujukan yaitu dari dana otsus tahun 2024 total 3.250.000.000 untuk tahun 2025 di naikan menjadi 3.500.000.000. Untuk Rujukan dibuat perbup dimana pembiayaannya meliputi biaya perjalanan pasien dengan 1 keluarga dan 1 pengantar dari RS, Rumah singgah termasuk makan minum pasien dan pengurusnya, terdapat 1 prawat yang ditugaskan untuk mendampingi pasien yang dirujuk di tempat tujuan

rujukan sampai pasien sembuh dan dipulangkan, jika pasien meninggal semua biaya pemulangannya ada di setda. Untuk sistemnya sudah rapih, namun yang menjadi perhatian khusus adalah pasien pasien yang kami rujuk di luar papua.

- Dana Otsus untuk tahun 2025 memang belum ada transferan namun ada kebijakan jika ada pasien emergency bisa dilayani demikian juga dengan komponen lainnya sudah dibijaki dari keuangan
- Pelayan kesehatan sebenarnya gratis jika di tanggung oleh BPJS namun yang sering jadi kendala adalah prosedur BPJS seperti harus ke puskesmas dulu baru ke RS yang sering pasien tidak mau dan langsung ke RS namun demikian pasien tetap kami layani secara gratis namun kami tetap mengeluarkan kwitansi karena kami bergerak ke BLUD, sejak tahun 2024 RS sudah BLUD, untuk menghitung potensi pemasukkan RS
- Selama ini RS tidak pernah kami membratkan masyarakat OAP, demikian juga dengan pasien pasien yang di rujuk dari puskesmas tetap makam minumnya kami layani dan tetap di tampung pasien di rumah singga dengan makam minumnya dari dinas sosial
- Dana otsus untuk RS selain untuk rujukan ada juga pembangunan fisik yaitu pembangunan 2 gedung yaitu gudang obat dan IPSRS. Dan pengadaan obat, dimana kami menggunakan e catalog dan obat obat fornas
- Untuk Rujukan ASN yang golongan 3 tetap kami bantu dengan beberapa kebijakan, namun ada juga yang ASN meminta bantuan lewat bansos, namun kami berharap ada regulasi yang bisa mengatur tentang ASN yang mendapatkan biaya rujukan dari dana otsus
- Ada masukkan dari Profesor dari bandung ; Asmat memiliki potensi yang sangat besar dengan fasilitas RS yang sangat bagus. Sebenarnya bisa dibuka sekolah di Asmat seperti SPK dan mereka bisa magang di RS dengan mendatangkan dosen dosen dari luar, supaya apa yang sudah di invest oleh pemda asmat di RSUD bisa dimanfaatkan dengan baik
- RS Asmat membutuhkan alat hemodialisa, sudah sampaikan kepada pimpinan tapi masih menunggu bertahap karena masih ada prioritas yang lain

- Sumber dana untuk RS ada juga dari DBH untuk membantu dana rujukan , DAK Fisik untuk pengadaan CT scan dan mammography, namun untuk perjalanan dinas tidak ada dari otsus kecuali rujukan pasien
- Angka kematian di RS sbnarnya masih di bawah angka normal untuk RS
- Proses pengadaan obat tidak ada masalah karena disesuaikan dengan PBF Penyedia dimana terdekat dan tercepat tiba di asmat

5) Pokja Papua Sehat :

- BP3OKP berdasarkan regulasi yang di atur di Perpres 106 dan 107 juga PMK 33 adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada presiden dimana dalam melaksanakan tugasnya SHEK terhadap penatalaksanaan otsus, jadi kami akan meminta laporan terhadap semua anggaran yang ada di kesehatan bukan hanya dari dana otsus tetapi juga dari sumber dana lainnya, seperti besarnya jumlah anggaran, sumber dana, jenis kegiatan, realisasi anggaran dan capaian hasil programnya, yang diharapkan dari suatu kegiatan bukan hanya outputnya tapi juga outcome nya
- Pada saat sekarang sedang proses penyusunan RPJMD dari bpk bupati yang baru terpilih, diingatkan untuk RPJMD mengacu pada RIPPP selain program prioritas dari bpk bupati
- Cakupan imunisasi yang rendah, mohon disampaikan apa kendala sehingga cakupannya rendah, karena yang diharapkan bukan hanya besar anggaran, kegiatan, output dan outcomenya tapi juga apa kendalanya sehingga kita bisa mencari solusinya
- Tenaga kesehatan, tinggal 3 puskesmas yang belum ada dokter meskipun banyak yang dokter kontrak. Jumlah puskesmas 22 dan 3 distrik yang belum ada puskesmas
- Pengusulan beasiswa Sekolah untuk tenaga analis sudah pernah di usulkan 4 tahun yang lalu tapi belum di respon oleh pimpinan daerah sebiknya di usulkan lagi pada saat ini, nanti kami BP3OKP akan mendorong hal ini sehingga bisa berjalan dengan baik, karena jika layanan primer ini bisa bagus otomatis rujukan bisa dimnimalisir
- Dana otsus untuk rujukan jika belum ada dana yang keluar mohon dicarikan solusinya sehingga kegiatan tetap berjalan

- Terkait kepesertaan BPJS dan Klaim BPJS memang harus dibicarakan dengan BPJS terkait sistem sehingga bisa memudahkan dalam penanganan pasien rujukan oleh RS yang merujuk
- Terkait usulan RS yang lebih membutuhkan alat HD daripada Cathlab coba didiskusikan dengan kemenkes siapa tau ada kebijakan dari kemenkes mengingat di RS lebih dibutuhkan HD daripada Cathlab
- Dinas kesehatan dan RS membuat telaah kebutuhan dan kendala yang ada sehingga BP3OKP bisa koordinasikan dengan K/L

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT

- Dana Otsus yang diberikan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sebesar 1.4 M yang dibagi dalam 2 kegiatan yaitu :
 1. 700 juta Kompetisi pelajar dengan sasaran anak SMP dan SMA yang dilaksanakan pada 5 distrik , Distrik Agats, Atsy, Sawar Ema untuk SMP dan Distrik Atsy dan Agats untuk SMA. Jenis kompetisi adalah Atletik / lari Sprint, Catur dan Pencak Silat
 2. 700 juta Hibah untuk organisasi olahraga dalam hal ini KONI. Organisasi olahraga yang sudah terbentuk di asmat adalah KONI dan BAPOPSI.
- BAPOPSI baru di bentuk tahun 2024 sehingga di harapkan BAPOPSI dapat dana tahun ini tapi karena efisiensi tahun ini tidak bisa diberikan.
- Akibat efisiensi yang diberikan dana otsus tahun 2025 sebesar 700 jt sehingga tidak bisa diberikan dana hibah
- Proses pencairan dana hibah adalah KONI yang mengajukan ke DISPORA, dan KONI hanya mengajukan 300 jt sehingaa masih ada sisa dana 300 jt , Dana yang tidak terealisasi ini adalah dari KONI yang tidak mengajukan atau tidak memanfaatkannya
- Di kabupateb Asmat ada 14 cabor , 12 sudah SK dari provinsi, 2 masih dalam proses
- Untuk tahun 2026 kabupaten Asmat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar (POP) untuk SMA se provinsi Papua Selatan. Terkait kegiatan ini tahun 2024 sudah dilaksanakan di kabupaten Merauke, dimana semua biaya kegiatan di tanggung oleh

kabupaten Merauke, baik penginapan, biaya makan semua di tanggung pihak penyelenggara

- Mohon bantuan BP3OKP pada saat musrembang otsus, dengan anggaran yang ada untuk saat ini tentu saja tidak akan cukup bisa membiayai kegiatan ini
- Untuk kegiatan kompetisi di Dispora kabupaten Asmat hanya dari sumber dana otsus sehingga sangat diharapkan dari dana otsus
- Untuk DAU tahun 2025 6,3 M dengan belanja pegawai hampir setengah
- Untuk kegiatan POP tahun 2025 sudah disepakati bersama dengan provinsi bahwa akan di tanggung sebagian kabupaten sebagian provinsi, sementara untuk kegiatan kompetisi tidak diberikan dari DAU
- Untuk mendatangkan atlet adalah komponen perjalanan apakah tidak berdampak karena efisiensi hal ini harus di koordinasi dengan provinsi
- Untuk kegiatan ini akan dibicarakan dengan provinsi apakah kabupaten hanya menanggung konsumsi dan akomodasi atau bagaimana
- Untuk perencanaan POP tahun 2026 usulan pagu anggaran 1.5 M tapi anggaran yang tersedia di kabupaten hanya 700 jt , dengan perkiraan kegiatan 1-2 minggu, jika tidak ada penambahan anggaran kemungkinan kegiatan tidak akan dilaksanakan karena khawatir tidak mampu. Cabor yang bisa dilaksanakan, volly, tinju, futsal, Forki , bulu tangkis, pencak silat, taekwondo, bilyard, catur, tenis meja sedangkan Atletik tidak bisa karena keterbatasan lintasan dan sepak takraw
- Sangat diharapkan bantuan BP3OKP untuk memfasilitasi dengan provinsi untuk penambahan dana atau koordinasi bagaimana teknisnya kegiatan POP ini
- Di RIPPP di pokja papua sehat olahraga 3 strategi dari 10 strategi
- Untuk olahraga masyarakat di kabupaten asmat masih rawan dilaksanakan karena sering terjadi keributan, kecuali senam bersama, sehingga lebih memilih olahraga pendidikan seperti olahraga di tingkat sekolah
- Olahraga yang dilaksanakan di dinas pendidikan hanya sebatas koordinasi dengan dinas pemuda dan olahraga. Untuk penguatan dan pembinaan prestasi semua full dari dinas pendidikan belum ada dari dinas olahraga

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Pemerintah kabupaten Asmat wajib mengumpulkan laporan kepada BP3OKP paling lambat tanggal 31 Maret , sesuai dengan PMK 33 tahun 2024
2. Penguatan program stunting di kabupaten Asmat
3. Koordinasi dengan kementerian kesehatan terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, 2 lokus pembangunan puskesmas yang masih tertunda, perumahan untuk tenaga kesehatan, beasiswa pendidikan untuk tenaga kesehatan dan kebutuhan alat Hemodialisa di RSUD Perpetua J Safanpo
4. Koordinasi dengan BPJS terkait jaminan kesehatan masyarakat kabupaten Asmat
5. Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar (POP) di kabupaten Asmat tahun 2026

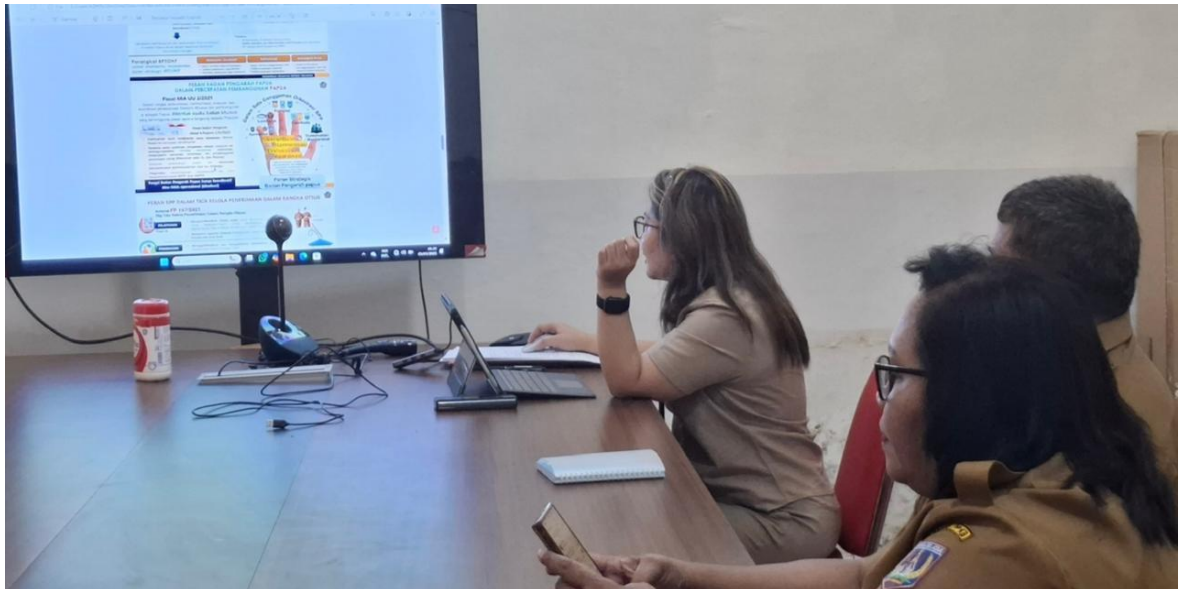
D. Dokumentasi Kegiatan











E. Kesimpulan

Telah dilaksanakan konsultasi dan koordinasi oleh anggota BPP, Pokja Papua Sehat dan Papua Produktif di kabupaten Asmat pada tanggal 17-21 Maret 2025

ANGGOTA BP3OKP

Pelaksanaan kegiatan Bulan Maret Anggota BP3OKP antara lain :

1. Kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dengan tujuan :
 - Kunjungan kerja BPP-PPS pada Kabupaten Asmat adalah untuk mendapatkan laporan percepatan pembangunan dalam rangka Otsus Papua, termasuk dengan penggunaan Dana Otsus sesuai UU No. 2 Tahun 2021 dan turunannya seperti PMK 33, dan mempertegas terkait tugas dan fungsi BP3OKP sebagai organisasi non kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan sinergi
 - Sesuai PMK 33 terkait pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus, pemerintah daerah wajib berkoordinasi dan diarahkan oleh BP3OKP
 - Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Th 2024, terkait penyerapan anggaran, dan selanjutnya akan dilakukan observasi sesuai penggunaan anggaran sudah tepat sasaran atau belum sesuai
 - Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi dalam jabatan BPP, meminta laporan Pertanggung Jawaban Keuangan sesuai perintah UU, Perpres dan ditegaskan PMK, Mohon kerjasamanya
 - Hasil diskusi Ketua DPR Kabupaten Asmat, masih banyak sekolah2 yang siswanya belum mampu Baca tulis
 - Pembenahan database, agama, adat melalui sistem yang interaktif agar dapat di akses oleh lapisan masyarakat. Dan diharapkan database tersebut untuk memudahkan dalam proses pembangunan dan tepat sasaran.
 - Visibity study, mapping wilayah harus dibuat, Kekhususan harus diperlihatkan secara detail, dan diharapkan mulai tahun 2025 dan seterusnya harus berbenah perbaikan sistem data-data OAP.
 - Keterbatasan anggaran dapat di tindaklanjuti dengan ketersediaan data yang selanjutnya akan dikomunikasikan dengan K/L di jakarta.
 - Target angka stunting 2041 harus “0”
 - Kebutuhan data di pusat, terkait permasalahan di daerah disampaikan ke pusat.
 - Tindaklanjuti koordinasi efisiensi anggaran bersama kementerian dalam negeri.
 - Jangan terjadi SILPA yang berlebihan, diharapkan adanya tertib manajemen pda OPD.

- Harapan penyerapan anggaran 95%, hasil Musrembang sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyerapan anggaran.
- Evaluasi kinerja masing-masing OPD dilakukan oleh Pimpinan Daerah.
- TW.1 sudah selesai, apakah sudah dilakukan evaluasi, utk itu apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui Pemerintah Daerah, diharapkan dapat melibatkan BPP-PPS untuk didiskusikan dengan tujuan mencari bersama.
- Evaluasi dilihat dari perencanaan harusnya TW 1 penyerapan anggaran seharusnya sudah 25%, TW selanjutnya disesuaikan.
- Filosofi, berharap pimpinan OPD yang berkompeten sesuai bidangnya, integritas dan kapabilitas.
- Harapannya kepada Asisten 3 dan Kepala Bapeda, dapat menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan program, sesuai berakhirnya periode waktu setiap triwulan.
- Buatlah perencanaan yang bijak dan matang
- Diharapkan semua kepala OPD dapat menyusun perencanaan pembangunan yang bijak dan matang, dan wajib memahami tujuan dan arah pembangunan, dan wajib turun ke lapangan.
- Adanya bantuan perumahan dan kementerian perumahan dan transmigrasi.
- Untuk pendidikan anak-anak OAP pentingnya database, agar pembagian Dana Otsus tepat sasaran, demikian juga untuk kesehatan.
- Buatlah Pakta Integritas untuk anak-anak yang memperoleh beasiswa khususnya untuk Jurusan Kedokteran, dan juga penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
- Pendidikan Pola Asrama sesuai permendikbudristek no. 44 tahun 2023
- Pembangunan Meseum Papua Selatan, agar menjadi tempat untuk melestarikan cagar budaya Papua Selatan.
- Mohon bantuan MRP untuk melestarikan identitas dan entitas suku-suku di Papua Selatan.

2. Kunjungan kerja dan Koordinasi Bersama Pimpinan Dinas Pendidikan Asmat, dengan topik diskusi tentang:

- Penjelasan singkat terkait legalitas, tugas dan fungsi BP3OKP dalam mendukung pencapaian Otonomi Khusus Papua
- Pendidikan yang layak bagi peserta didik OAP, apresiasi yang dalam bagi

seluruh sekolah, guru dan tendik.

- Bagaimana pendidikan di KA, dari kota sampai pelosok
- Bagaimana dengan guru2 ,tentang Jumlah guru mengajar dari PAUD, - SMA
- Bagaimana penyebaran guru-guru, adanya info : ketiga guru mengajar di Swasta, setelah lolos P3K mereka pindah ke sekolah-sekolah negeri. Perlu disikapi tegas
- Bagaimana pengelolaan Dana Otsus dan DBOD, kami diwajibkan dan diharuskan oleh aturan terkait dengan laporan penggunaan Anggaran Operasional setiap tahun anggaran harus dilaporkan last 31 Maret setiap tahun.
- Harapan kita Kadin Mampu di manage anggaran agar terabsorb 95%, hindari SILPA yang besar, karena akan berdampak pada program berikutnya.
- Pentingnya perencanaan yang maksimal, agar setiap bidang dapat dibiayai secara maksimal.
- BP3OKP mempunyai keleluasaan menyampaikan ke pemerintah pusat (pepus) terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah kami.
- Data-data dari sekolah-sekolah, terkait sekolah aktif, penyebaran guru dll.
- Pengaturan beasiswa, adanya info utk dinas pendidikan dari PAUD-SMA/SMK.
- Tindakanjut pengembalian pengelolaan SMA/K ke dinas pendidikan PPS oleh Gubernur Papua Selatan sudah dilakukan
- Masalah guru-guru honor, data mohon di share. Honor Sekolah, Kab dan Provinsi
- Adanya usulan pemenuhan kebutuhan guru yang telah dilakukan oleh Pemerinta daerah yaitu Bupati, namun usulan tersebut tidak spesifik sesuai kebutuhan.
- Data guru PNS, P3K, Honor ada berapa banyak? Dan kebutuhan guru untuk tahun 2025 berapa banyak? Dan usulan dilakukan secara berjenjang disampaikan ke Pusat.
- Tahun lalu Bupati Asmat, Merauke, BODI, tidak merespon surat dari BAKN dan PAN RB dan yang merespon hanya PJ Bupati Mappi sehingga Mappi mendapat kuota 2500. Mohon menjadi perhatian!!!
- Semoga di Tahun ini jangan terulang, dan harus secara spesifik disampaikan sesuai kebutuhan.
- Penyebab saudara-saudara kita demo, karena adanya ketidaksesuaian usulan

kebutuhan sesuai dengan kriteria.

- Tujuannya adalah untuk pembinaan SDM OAP non skill, kira-kira dapat ditempatkan dimana saja untuk pembinaan selanjutnya. Harusnya adanya konsep dari Kepala Daerah secara berjenjang, sehingga tidak menimbulkan keresahan SDM OAP.
- Pokja Papua Cerdas melakukan diskusi terkait dengan pendidikan.
- Kondisi pendidikan saat ini di Kab. Asmat yang terjadi seperti apa, agar jangan ada kesan siswa SMP belum bisa baca tulis, sesuai info dari ketua DPR K. dan selain itu anak usia sekolah tidak dapat bersekolah karena belum mempunyai Akte Kelahiran. Solusinya : Bicarakan dengan dukcapil agar menjadi perhatian.
- Kompensasi untuk guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, dalam proses usulan ke pemerintah pusat. Dan apabila disetujui, maka Pemda melalui Dinas Pendidikan untuk menyusun instrumen kontrol dan pengawasan bagi guru-guru tersebut.
- Konteks Dana Otsus diharapkan hanya beredar di Papua Saja, namun tetap mempertimbangkan masalah kualitas.
- Arahkan untuk FKIP melalui kegiatan PPL dari Unmus, bisa disebar keseluruh Kabupaten, rekomendasi 6 bulan.
- Untuk rekrut guru-guru, jika OAP tidak mampu mendidik anak-anak didik OAP. Harusnya membuka peluang untuk datangkan guru-guru dari luar, dan terkait pembiayaan apakah DIPA Daerah atau kementerian, namun belum ada solusi.
- Langkah-lanhhkah pembenahan yang dilakukan untuk pendidik OAP yang melakukan pelanggaran dalam mendidik.
- Tindaqlanjut penanganan terkait meningkatkan sistem pembelajaran, dengan catatan harus ada asrama-asrama.
- Efektifnya Pendidikan Pola Asrama dapat diselenggarakan dengan baik melalui Gereja-gereja atau pesantren.mellaui pola ini peserta didik akan memperoleh 3 hal dalam membentuk karakter yaitu : Iman, Morak dan Pendidikan dan juga memberikan didikan soal bertanggungjawab.
- Untuk starlink mohon dibuatkan Mapping, dimana saja titik-titik pemasangan, dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Kominfo.
- Warning penggunaan Dana Otsus sesuaikan dengan PMK 33 Tahun 2024.
- Terkait keputusan Bupati untuk pembebasan biaya pendidikan pada sekolah

Negeri, namun perlu dipertimbangkan juga terkait dampak pada sekolah-sekolah swasta. Tetap dapat dilakukan adanya pendekatan dan distribusi/subsidi dari Wali murid, dan diharapkan juga ada subsidi dari pemda melalui Dana Otsus, agar sekolah swasta tetap beroperasi.

- Perlu ada tindaklanjut secara khusus dan akan dibicarakan pada tingkat provinsi maupun tk pusat.
 - Harapan dalam penggunaan dana BOS, digunakan oleh sekolah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
 - Terkait koordinasi dengan perindakop untuk pemenuhan kios-kios di kampung-kampung di pedalaman Kab. Asmat, akan ditindaklanjuti dengan komunikasi antara Anggota BPP-PPS dan Pemerintah Provinsi, BUMD terkait.
 - Akan ditindaklanjuti untuk PPS diberikan bantuan kapal (Kapal ampibi), yang dapat mengarungi lautan/sungai dangkal, yang diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan 3 kabupaten (Merauke, Asmat dan Mappi). Tujuannya agar guru-guru dan nakes tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam pelaksanaan tugasnya di kampun-kampung. Hasil diskusi Musrembang Nasional, pengadaanya di rencanakan tahun 2025.
3. Kunjungan Sekolah-sekolah Distrik Agats Kabupaten Asmat bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan belajar, peserta didik mayoritas OAP, ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, ketersediaan guru dan tendik.
 4. Kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dengan tujuan :
 - BP3OKP ingin mendapatkan gambaran Dan masukkan langsung untuk dapat kami sampaikan ke pusat terkait pelayanan kesehatan di kabupten Asmat, jumlah dokter spesialis, bagaimana kondisi pustu yang ada di kampung dan distrik
 5. Sosialisasi BP3OKP bersama pemprov pps, pemkab asmat kepada masyarakat di Kabupaten asmat
 6. Audiensi Kepala BP3OKP bersama pemprov pps dengan pimpinan Keuskupan Asmat di rumah Uskup

Dokumentasi



Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat



Kunjungan Sekolah-Sekolah Agats Kabupaten Asmat



Kunjungan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat



**Sosialisasi BP3OKP bersama Pemprov Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat di
Kabupaten Asmat**





**Audiensi Kepala BP3OKP bersama Pemprov Papua Selatan dengan pimpinan
Keuskupan Asmat di rumah Uskup**

Penutup

Demikian laporan Laporan Bulan Maret Tahun 2025 dalam Rangka SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Dan Koordinasi) Pelaksanaan Tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Anggota dan kelompok kerja (POKJA) BPP-PPS, untuk digunakan sebagaimana mestinya.